

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON
PERTANIAN DENGAN METODE *ANALYTICAL
HIERARCHY PROCESS* (AHP)**

**(Studi pada Kecamatan Karangploso Dan
Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

TINOVIA HARLIES REYNALDA

145020101111064

**Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan
Keputusan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian dengan
Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP)
(Studi pada Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari,
Kabupaten Malang)"**

Yang disusun oleh :

Nama : Tinovia Harlies Reynalda
NIM : 145020101111064
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Sumber Daya

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **14 Februari 2018**
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Shofwan, SE., M.Si.
NIP.197305172003121002
(Dosen Pembimbing)
2. Dr. Sri Muljaningsih, SE., MSP
NIP.196104111986012001
(Dosen Penguji I)
3. Moh Athoillah, SE., ME
NIP.2016058411211001
(Dosen Penguji II)

Malang, 14 Februari 2018
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan,



Marlina Ekawaty, SE., M.Si., Ph.D.
NIP.196503111989032001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Tinovia Harlies Reynalda**
Tempat, tanggal lahir : **Madiun, 3 November 1996**
NIM : **145020101111064**
Jurusan : **S1-Ilmu Ekonomi**
Konsentrasi : **Sumber Daya**
Alamat : **Perumahan Puri Kartika Asri. Jalan Ikan Tombro Barat blok K-11. Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Tunjungsekar, Kota Malang, Jawa Timur**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DENGAN METODE
ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)**

(Studi pada Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Februari 2018

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Shofwan, SE., M.Si.
NIP.197305172003121002

Yang membuat pernyataan,



Tinovia Harlies Reynalda
NIM.145020101111064

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan,



Marlina Ekawaty, SE., M.Si., Ph.D.
NIP.196503111989032001



TINOVIA HARLIES REYNALDA

CAREER OBJECTIVE

Economic Analyst, Economic Development Planner, Business Woman

EDUCATION

UNIVERSITY OF BRAWIJAYA / BACHELOR DEGREE	2014-2018
• Major in Economic Science	GPA: 3.88
SMA NEGERI 17 SURABAYA	2011-2014
SMP NEGERI 36 SURABAYA	2008-2011
SDN SIWALANKERTO II/419 SURABAYA	2002-2008

ORGANIZATIONAL EXPERIENCE

Paskibra SMPN 36 Surabaya	2008-2011
OSIS SMPN 36 Surabaya	2008-2010
Paskibra SMAN 17 Surabaya	2011-2013
Vocal Group of SMAN 17 Surabaya	2011-2013
BEM FEB UB	2014-2016
Homeband FEB UB	2016-2018

COMMITTEE EXPERIENCE

Inspiring	2014
Marketing Circle	2015
Rubrik	2015
Olimpiade Brawijaya	2015
Economics Sport and Talent	2015
KM FEB DAY I	2015
PKK MABA	2015
Pemilihan Wakil Mahasiswa	2015
Organizational Training Homeband FEB UB	2016

CERTIFICATIONS

Entrepreneur Seminar & Business Plan Competition	2014
Seminar Mahasiswa Mandiri	2014
Get Ready to be Wealthy	2015
Microsoft Office Desktop Application	2017
Sharia Banking Training Center	2018
ICEBEF	2018
Basic Training BFA	2018

HOBBIES AND INTEREST

HOBBIES

Sports : Jogging, Yoga.
Music : Sing, Guitar.
Watching : Movies (Drama, History, Horror, Comedy), TV (Cooking, Moeslm News, Music).
Traveling : Temple, Historical Cities, Beach, Mountain

INTEREST

Business, banking, music and fashion.

JOB EXPERIENCE

Batu City Regional Secretariat	2017
Bank Syariah Mandiri	2018
BRILIFE	2018

FUTURE AND LIFETIME OBJECTIVE

Being someone who can always inspire others



CONTACT DETAILS

Permanent Address

Perumahan Makarya Binangun
Jalan Dewi Sartika Utara IV/XE-
28. Waru-Sidoarjo. 41256.

Cell Phone

+6281216269655

Email

tinoviah@gmail.com

PERSONAL DATA

Female / 22

Madiun, 03-11-1996

Instagram

reynaldawibowo

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS Al-Baqarah, 2:216)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian dengan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) disertai studi pada Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan tepat waktu. Adapun skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat meraih derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Namun, kendala tersebut telah teratasi karena penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Shofwan, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini.
2. Bapak Nurkholis, SE., M.Bus.(Acc)., Ak., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME selaku Kepala Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr. Sri Muljaningsih selaku dosen penguji I, yang telah menghadiri ujian komprehensif penulis dan memberi beberapa masukan untuk perbaikan penulisan.

5. Bapak Moh. Athoillah, SE., ME selaku dosen penguji II, yang juga telah menghadiri ujian komprehensif penulis dan memberi beberapa masukan untuk perbaikan penulisan.
6. Seluruh dosen jurusan Ilmu Ekonomi pada khususnya, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada umumnya, yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat untuk mendukung penulisan skripsi ini.
7. Bapak Moh. Zamil, Amd., SP selaku Koordinator Penyuluh BPP Singosari, Bapak Erdi Prang Basuki Raharjo selaku Penyuluh Desa Watugede, serta Bapak Fahrur Rozzy selaku ketua Gapoktan Makmur Sentosa dan Kelompok Tani Suka Makmur, yang membantu dalam proses pengkoordinasian responden penelitian.
8. Seluruh responden yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya.
9. Kedua orangtua penulis, Hari Wibowo, ST dan Wilis Pratiwi, SE yang telah memberikan nasihat, motivasi, dukungan dan doa kepada penulis.
10. Calon suami, Dwikidyatama Iswara, SE yang telah memberikan semangat dan dukungan tanpa henti dalam melakukan penelitian hingga penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat tercinta yang setia memberikan semangat kepada penulis, Fia, Vira, Tika, Salma, Kevin, Wandy, Ega, Tyas, Frida, Anan dan sepupu yang saya sayangi, Tectona, Angela, dan Dian Ayu, serta teman-teman Homeband FEB UB yang selalu menghibur dan memberikan semangat baru kepada penulis.
12. Pihak–pihak terkait lainnya yang telah banyak membantu baik untuk penelitian maupun dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dapat diakui bahwa penulis tidaklah sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT begitu pula dalam penulisan ini, apabila nantinya terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua serta generasi penerus bangsa.

Malang, 14 Februari 2018

Tinovia Harlies Reynalda



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN
KEPUTUSAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN
DENGAN METODE *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS* (AHP)**

**(Studi pada Kecamatan Karangploso Dan Kecamatan Singosari, Kabupaten
Malang)**

Tinovia Harlies Reynalda, Shofwan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email: tinoviah@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, keberadaan lahan terutama lahan pertanian semakin terancam dikarenakan kebutuhan akan suatu tempat tinggal yang semakin meningkat serta adanya upaya dalam mewujudkan pembangunan nasional. Fenomena perubahan struktur ini yang memacu terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian baik itu untuk pemukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, maupun sarana publik. Kabupaten Malang juga terus mengalami pengembangan wilayah guna mencapai efektifitas dan efisiensi pemerataan pembangunan yang dibagi menjadi enam wilayah pengembangan (WP) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari juga termasuk ke dalam dua dari lima kecamatan di Kabupaten Malang yang paling cepat mengalami penyusutan lahan pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab utama pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari. Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan analisis adalah faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kondisi lahan, dan faktor peraturan pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*), pengambilan keputusan alih fungsi lahan di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari secara umum dipengaruhi oleh faktor peraturan pemerintah. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang masih fokus pada pengembangan wilayah dan pembangunan sektor non pertanian demi perekonomian yang lebih maju.

Kata kunci: Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari, Alih Fungsi Lahan Pertanian, *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING DECISION MAKING OF THE FUNCTION OF AGRICULTURAL LAND CONVERSION TO NON AGRICULTURAL USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD

(Study in Karangploso and Singosari Districts, Malang Regency)

Tinovia Harlies Reynalda, Shofwan

Faculty of Economics and Business, University of Brawijaya

Email: tinoviah@gmail.com

ABSTRACT

Along with increasing population growth, the existence of land, especially agricultural land, is increasingly threatened due to the increasing need for a place to live and efforts to realize national development. This phenomenon of structural change has spurred the conversion of agricultural land into non-agricultural land for settlements, industrial estates, trade areas, and public facilities. Malang Regency also continues to experience regional development in order to achieve the effectiveness and efficiency of development equality which is divided into six development areas (WP) in accordance with Regional Regulations (Perda) Number 3 of 2010 concerning Spatial and Regional Plans (RTRW). Karangploso and Singosari Districts are also included in two of the five sub-districts in Malang Regency which experience the fastest shrinking of agricultural land. The purpose of this study was to find out and analyze the main causes of decision-making on the conversion of agricultural land to non-agriculture in the Karangploso and Singosari Districts. There are factors that used as the material of analysis, which are economic factors, social factors, land conditions, and government regulation factors. Based on the results of calculations using the AHP (Analytical Hierarchy Process) method, the decision-making on land conversion in Karangploso and Singosari Districts is generally influenced by government regulation factors. This is due to government policies that are still focused on developing the region and developing the non-agricultural sector for a more advanced economy.

Keywords: Karangploso and Singosari Districts, Functions of Agricultural Land Conversion, Analytical Hierarchy Process (AHP)

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Kependudukan Malthusian	13
2.1.2 Teori Sewa Tanah Diferensial Ricardo	14
2.1.3 Teori Lokasi Von Thunen	15
2.1.4 Teori Penawaran dan Permintaan Lahan	16
2.1.5 Pertanian dan Lahan Pertanian	18
2.1.6 Konversi Lahan Sawah	18
2.1.7 Teori AHP (Analytical Hierarchy Process)	21
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	31
3.4 Data yang Diperlukan dan Sumber Data	32
3.5 Cara Pengambilan Data	34
3.6 Populasi dan Sampel	34
3.7 Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.1.1 Kabupaten Malang	43
4.1.2 Kecamatan Karangploso	46
4.1.3 Kecamatan Singosari	49
4.2 Analisis dan Interpretasi Data	52
4.2.1 Perbandingan Prioritas Bobot Pada Level 1 (<i>Criteria</i>)	55
4.2.2 Perbandingan Prioritas Bobot Pada Level 2 (<i>Sub-Criteria</i>)	58

4.3 Implikasi terhadap Sosial Ekonomi Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

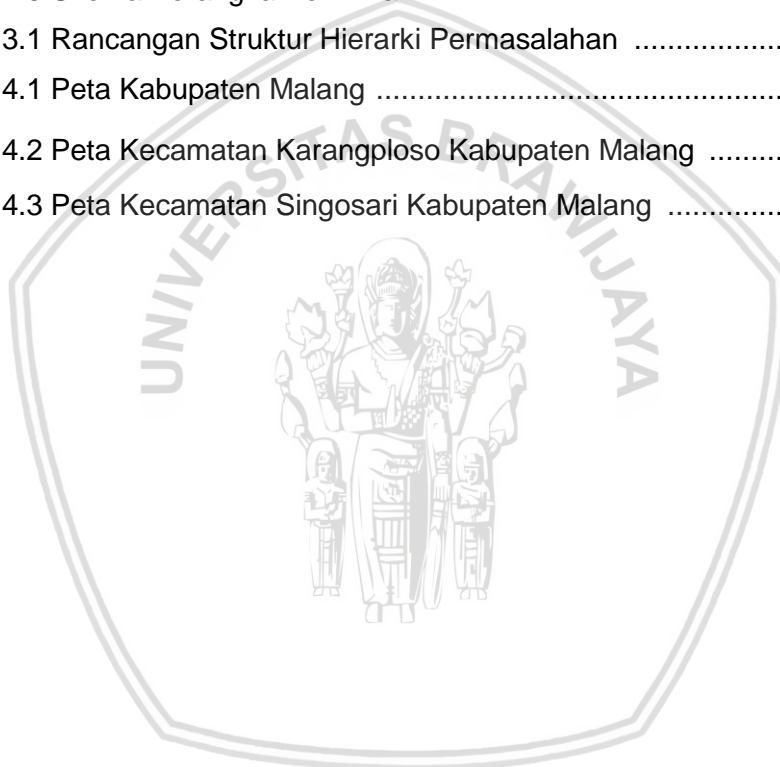
	Halaman
Tabel 1.1 Perencanaan Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang.....	3
Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Tanah yang Bersertifikat di Kabupaten Malang Tahun 2011-2014	7
Tabel 2.1 Proses Penyusunan Hierarki	23
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Pengumpulan Data Primer	33
Tabel 3.2 Penentuan Responden Penelitian	36
Tabel 3.3 Skala Kepentingan Aktivitas-aktivitas Secara Relatif	39
Tabel 4.1 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB di Kabupaten Malang Tahun 2011-2015	45
Tabel 4.2 Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB di Kabupaten Malang Tahun 2011-2015	45
Tabel 4.3 Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Perkebunan) Terhadap PDRB di Kabupaten Malang Tahun 2011-2015	45
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk beserta Mata Pencaharian Kecamatan Karangploso Tahun 2017	48
Tabel 4.5 Nama Desa/Kelurahan dan Luas Lahan di Kecamatan Singosari	50
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk beserta Mata Pencaharian Kecamatan Karangploso Tahun 2017	51
Tabel 4.7 Perhitungan Prioritas Bobot Kriteria Kecamatan Karangploso	53
Tabel 4.8 Perhitungan Prioritas Bobot Kriteria Kecamatan Singosari	54
Tabel 4.9 Perhitungan Prioritas Bobot Kriteria Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari	56
Tabel 4.10 Perbandingan Prioritas Bobot Kriteria Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari	57
Tabel 4.11 Perbandingan Prioritas Bobot SubKriteria Berdasarkan Faktor Ekonomi	59
Tabel 4.12 Perbandingan Prioritas Bobot SubKriteria Berdasarkan Faktor Sosial	60
Tabel 4.13 Perbandingan Prioritas Bobot SubKriteria Berdasarkan Faktor Kondisi Lahan	61

Tabel 4.14 Perbandingan Prioritas Bobot SubKriteria Berdasarkan
Faktor Peraturan Pemerintah 62



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Rancangan Wilayah Pengembangan (WP I – WP VI)	4
Gambar 1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2016	6
Gambar 2.1 Land Rent berdasarkan Teori Lokasi Von Thunen	15
Gambar 2.2 Pembentukan Harga Tanah atau Sewa Tanah	17
Gambar 2.3 Skema Kerangka Pemikiran	29
Gambar 3.1 Rancangan Struktur Hierarki Permasalahan	38
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Malang	46
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang	47
Gambar 4.3 Peta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Nama Responden Penelitian

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

Lampiran 3 Rekapitulasi Hasil Penilaian Responden

Lampiran 4 Langkah-Langkah Perhitungan AHP

Lampiran 5 Foto Kegiatan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan merupakan sumber daya yang paling penting bagi penduduk Indonesia (Tjondronegoro,1999). Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, keberadaan lahan terutama lahan pertanian semakin terancam dikarenakan kebutuhan akan suatu tempat tinggal yang semakin meningkat serta adanya upaya dalam mewujudkan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Fenomena perubahan struktur ini yang memacu terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian baik itu untuk pemukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, maupun sarana publik. Menurut pendapat Kamilah (2013), alih fungsi lahan yang lazimnya disebut konversi lahan merupakan perubahan penggunaan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi lain sebagai akibat dari pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk.

Teori Malthus menyatakan bahwa kecenderungan pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan deret ukur, sedangkan pada saat yang sama persediaan pangan hanya meningkat berdasarkan deret hitung (Todaro,2013). Namun, Malthus melupakan satu hal yang dapat mengatasi masalah pertumbuhan pertanian yakni teknologi. Konsep mengenai teknologi pertanian terdapat dalam teori Boserup yang mengungkapkan bahwa adanya tekanan penduduk dapat mempercepat inovasi teknologi. Adapun teknologi pertanian yang dinamik meliputi perubahan cara bercocok tanam, pemilihan alat yang disesuaikan dengan penggunaan lahan. Namun, dari kedua teori ini juga tidak menutup kemungkinan muncul masalah baru yaitu apabila alih fungsi lahan justru

disebabkan karena kegagalan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lahan maupun keinginan pribadi pemilik lahan untuk menjual lahannya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menempatkan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sehingga setiap daerah kabupaten memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk menyusun serta melaksanakan kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi, potensi, dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sektor pertanian yang merupakan sumber bahan baku primer dan penyedia kebutuhan pangan dalam negeri, namun peran sektor pertanian ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Pada masa orde baru, kebijakan pemerintah sangat bertumpu pada sektor pertanian. Bentuk keberhasilan dari kebijakan tersebut terbukti pada tahun 1984 Indonesia mampu mencapai swasembada pangan.

Berdasarkan hasil sensus pertanian 2013, yang merupakan sensus pertanian keenam yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik setiap sepuluh tahun sekali sejak tahun 1963, dijelaskan bahwa Kabupaten Malang tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak di Jawa Timur, yakni sebanyak 328.369 rumah tangga, serta mayoritas petani menguasai lahan seluas 2.000-4.999 m². Namun yang perlu dipahami adalah masih terdapat petani yang menguasai lahan kurang dari 1.000 m². Hal ini disebabkan oleh hukum waris kepemilikan lahan, juga persaingan yang timpang dalam penggunaan lahan antara sektor pertanian dan non pertanian. Kabupaten Malang juga terus mengalami pengembangan wilayah guna mencapai efektifitas dan efisiensi pemerataan pembangunan yang dibagi menjadi enam wilayah pengembangan (WP) sesuai dengan Peraturan Daerah

(Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) seperti pada Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 berikut ini.

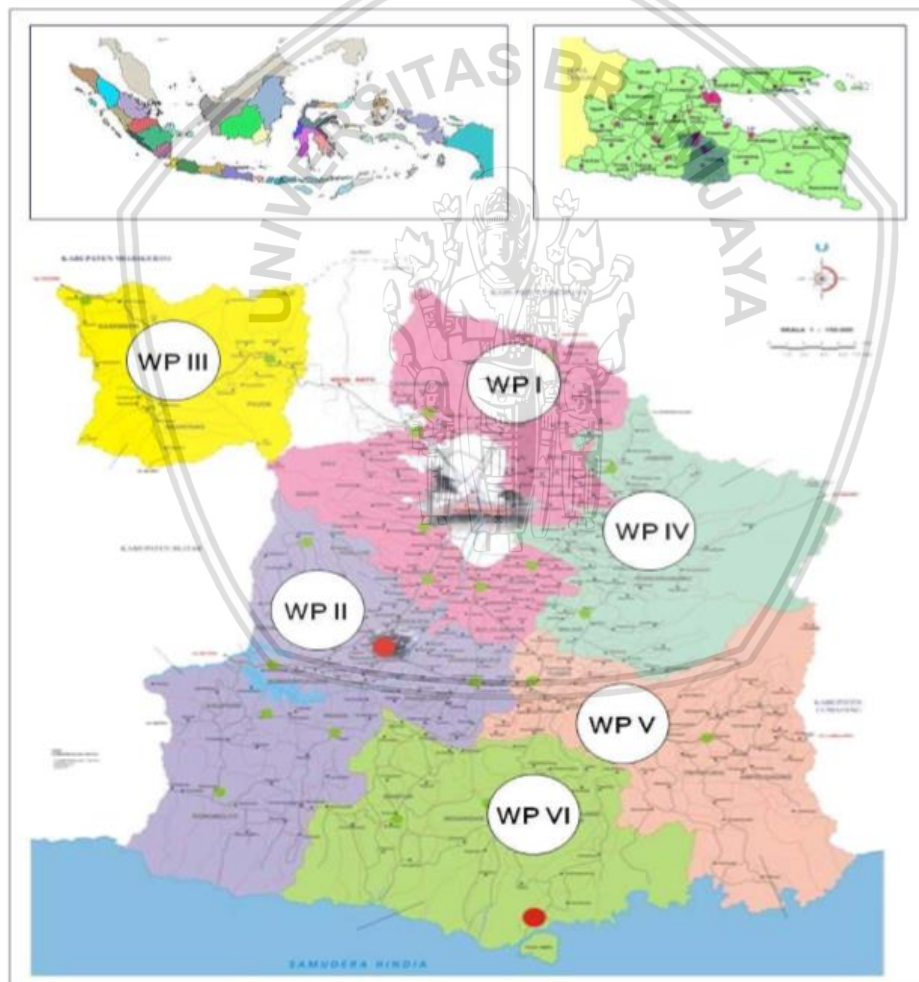
Tabel 1.1: **Perencanaan Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang**

Wilayah Pengembangan	Kecamatan	Potensi Pengembangan (Sub Sektor)	Prioritas Pengembangan Infrastruktur
WP I (lingkar Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang)	Dau, Karangploso, Lawang, Singosari, Pakisaji, Wagir, Tajinan, Bululawang, Pakis	Perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara	Peningkatan akses jalan tembus ke Kota Malang; Pengembangan jalan Malang-Batu; Peningkatan konservasi lingkungan; Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang - Bandara Abdul Rahman Saleh dan pengembangan pemukiman.
WP II (Kapanjen)	Kapanjen, Wonosari, Ngajum, Kromengan, Pagak, Sumberpucung, Kalipare, Donomulyo, Gondanglegi, Pagelaran	Perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata	Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kapanjen; Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Ngliyep; Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan; Peningkatan kapasitas jalan akses; Peningkatan ketersediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan dan pengembangan pemukiman.
WP III (Ngantang)	Ngantang, Pujon, Kasembon	Pariwisata antara lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan,	Jalan menuju sentra produksi pertanian di perdesaan; Jalan penghubung dengan Blitar dari Ngantang; Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang Pujon-Ngantang-Kasembon-Kandangan; Peningkatan ketersediaan air di pedesaan dan penunjang irigasi; Pengembangan jalan kabupaten sebagai alternatif provinsi.
WP IV (Tumpang)	Tumpang, Poncokusumo, Wajak, Jabung	Pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri	Jalan utama Pakis-Tumpang-Poncokusumo-Ngadas-Bromo; Jalan pada pusat ekonomi di pedesaan; Jalan tembus utama antar kecamatan; Perbaikan sistem irigasi dan ketersediaan air; pengembangan Kawasan Agropolitan Poncokusumo termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak
WP V (Turen dan Dampit)	Turen, Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading	Pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan dan kelautan, industri, pariwisata serta kehutanan	Jalan menuju pedesaan pusat produksi; Jalan menuju pantai selatan (perikanan dan pariwisata); Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami; Peningkatan irigasi dan ketersediaan air

Wilayah Pengembangan	Kecamatan	Potensi Pengembangan (Sub Sektor)	Prioritas Pengembangan Infrastruktur
WP VI (Sumbermanjing Wetan)	Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur	Pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan	Jalan kearah perdesaan pusat produksi; Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata); Pengembangan pelabuhan berskala nasional; Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami); Peningkatan irigasi dan ketersediaan air; Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru

Sumber : Data diolah RPJMD 2016-2021, 2018

Gambar 1.1: Peta Rancangan Wilayah Pengembangan (WP I – WP VI)



Sumber : Data diolah RPJMD 2016-2021, 2018

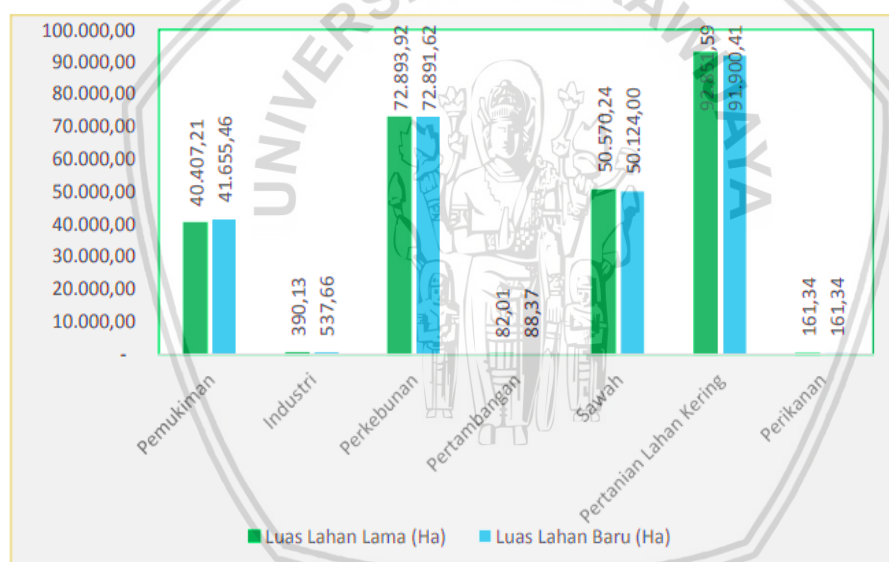
Berdasarkan tabel maupun gambar di atas, wilayah pengembangan yang paling dekat dengan perkotaan (Kota Malang dan Kota Batu) adalah WP I,

diantaranya pada Kecamatan Dau, Karangploso, Singosari, Lawang, Pakisaji, Wagir, Tajinan, Bululawang, Pakis. Di sisi lain, yang menjadi prioritas pengembangan infrastruktur pada WP I adalah peningkatan akses jalan tembus ke Kota Malang, pengembangan jalan Malang-Batu, peningkatan konservasi lingkungan, peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang - Bandara Abdul Rahman Saleh dan pengembangan pemukiman. Pemerintah Kabupaten Malang (2014), telah menyatakan bahwa dari 33 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Malang, terdapat lima kecamatan yang paling cepat mengalami penyusutan lahan sawahnya, yakni Singosari, Kepanjen, Lawang, Pakis, dan Karangploso. Namun, dua kecamatan yang masih berdampingan dengan pusat Kota Malang yang dikenal sebagai Kota Pendidikan dan Kota Batu yang juga dikenal sebagai Kota Pariwisata yakni Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari. Dalam hal ini Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso merupakan kecamatan yang memiliki aksesibilitas tinggi karena dilalui jalur utama Kota Surabaya sampai dengan Kota Malang, Kota Batu, dan seterusnya sehingga banyak investor yang ingin memanfaatkan peluang tersebut untuk kepentingan pribadi, sehingga menyebabkan keberadaan lahan di dua kecamatan tersebut terancam oleh derasnya laju pembangunan infrastruktur dan industrialisasi.

Adapun dampak lain dari perencanaan wilayah pengembangan ini adalah meningkatnya kebutuhan lahan, namun pada hakikatnya lahan bersifat tetap (tidak berubah luasnya), sehingga alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian rawan terjadi. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 36 yang menjelaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat dilakukan hanya terbatas pada kepentingan umum yang meliputi jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam

dan/atau pembangkit dan jaringan listrik. Berbagai kebijakan pemerintah seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang juga telah menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa sawah-sawah irigasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan. Namun apakah daya apabila alih fungsi lahan pertanian dilakukan secara ilegal serta penyebabnya justru datang dari pemilik lahan yang ingin menjual sebagian atau seluruh lahannya.

Gambar 1.2: Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2016



Sumber : Data diolah RPJMD 2016-2021, 2018

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 1.2, dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan penggunaan lahan, yakni jumlah perkebunan, sawah, dan pertanian lahan kering mengalami penurunan akibat adanya alih fungsi lahan menjadi pemukiman, industri, dan pertambangan yang menunjukkan angka peningkatan.

Tabel 1.2: **Perkembangan Jumlah Tanah yang Bersertifikat di Kabupaten Malang Tahun 2011-2014**

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Tanah Bangunan/Gedung	bidang					
	Jumlah Hak Milik		227.753	239.711	252.569	263.033	275.500
	Jumlah Hak Guna Bangunan		20.640	23.713	25.736	27.553	29.247
	Jumlah Hak Pakai		1.009	1.074	1.131	1.287	1.493
	Jumlah Wakaf		221	235	259	270	280
	Jumlah Hak Pengelolaan		26	26	26	26	26
2	Tanah Pertanian/ Perkebunan/ Ladang	bidang					
	Jumlah Hak Milik		5.402	0	0	0	0
	Jumlah Hak Pakai		0	0	0	0	0
	HGU		119	125	125	129	130

Sumber : Sumber : Data diolah RPJMD 2016-2021, 2018

Kemudian data perkembangan jumlah tanah yang bersertifikat di Kabupaten Malang pada tahun 2011-2014 pada Tabel 1.2 dapat dipahami bahwa jumlah tanah bangunan/gedung yang bersertifikat di Kabupaten Malang mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dalam bidang hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, wakaf, dan hak pengelolaan. Namun, hal ini tidak berlaku pada tanah pertanian/perkebunan/ladang yang tidak mengalami perubahan jumlah tanah yang bersertifikat pada bidang hak milik dan hak pakai. Berbeda halnya pada HGU (Hak Guna Usaha) yang mengalami peningkatan sedikit namun tidak signifikan. Fenomena ini berkaitan dengan izin lokasi yang diberikan oleh pemerintah sehingga seseorang bisa mendapatkan sertifikat tanah, meski tanpa disadari tanah bangunan/gedung sangat timpang jumlahnya dengan tanah pertanian/perkebunan/ladang. Hal inilah yang juga bisa menjadi sebab-akibat dari transformasi ekonomi dalam alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bangunan baik pemukiman, pertokoan, perkantoran, perumahan, dan lain-lain.

Tingkat kepemilikan areal pertanian per rumah tangga petani di Indonesia juga tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara Thailand maupun

Switzerland. Sistem kepemilikan tanah di negara yang memiliki motto “Thailand Kitchen Of The World” tersebut berjalan efisien, karena adanya ketentuan mengenai hak waris yang dilaksanakan dengan pembagian saham hasil pertanian yang dikelola oleh salah satu anggota keluarga dan labanya dibagikan sebagai dividen, sehingga hampir seluruh lahan pertanian di Thailand telah memenuhi skala produksi. Sama halnya dengan di Switzerland yang memiliki sistem pewarisan yang tidak boleh dipecah sehingga tingkat kepemilikan lahannya paling sedikit tiga hektare per rumah tangga petani, sedangkan kepemilikan lahan di Indonesia rata-rata hanya 0,2 hektare per rumah tangga petani. Adanya kebijakan pemerintah terkait rencana tata ruang wilayah maupun insentif bagi petani juga pada implementasinya belum berjalan optimal sehingga petani maupun pemilik lahan juga tidak mempunyai alasan untuk tetap mempertahankan keberadaan lahannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari sebuah Jurnal Manajemen Agribisnis yang berjudul “Faktor-Faktor Pendorong Alih Fungsi Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian” yang ditulis oleh Ida Ayu Listia Dewi dan I Made Sarjana, dengan metode observasi dan wawancara menjelaskan bahwa adanya faktor-faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Subak Kerdung, antara lain disebabkan karena rendahnya pendapatan usaha tani padi akibat adanya pembagian antara penggarap dan pemilik lahan dengan perbandingan 2:1, yaitu 2 untuk penggarap dan 1 untuk pemilik lahan. Kemudian adanya pemilik lahan yang bekerja di sektor lain dan memercayakan lahannya diolah oleh penggarap sehingga permasalahan di lapangan terkadang tidak diketahui oleh pemilik lahan. Lalu, harga lahan di wilayah Subak Kerdung juga semakin tinggi, banyak pula petani yang membuka usaha di sektor non pertanian, dorongan kegiatan adat termasuk agama di dalamnya, adanya keinginan mengikuti perilaku lingkungan sekitar yang memanfaatkan lahannya demi meningkatkan pendapatan, serta

lemahnya kelembagaan subak dalam mencegah kegiatan alihfungsi lahan, dan lemahnya implementasi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yaitu kurang jelasnya aturan dan sanksi bagi pelanggar juga turut mendasari faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian di Subak Kerdung. Adanya faktor budaya menjadi fokus utama penyebab alih fungsi lahan di Subak Kerdung. Mayoritas petani Bali yang menganut kepercayaan Hindu menjual lahannya dengan alasan mencari dana sebagai pendukung kegiatan adat yakni memperbaiki tempat persembahyangan maupun upacara-upacara adat beserta jamuan makanan yang mana semuanya akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal tersebut menjadi prioritas karena telah menyangkut masalah kepercayaan dan adat yang mendasari kehidupan bermasyarakat di Kota Denpasar.

Sedangkan permasalahan alih fungsi lahan di Karangploso dan Singosari, secara umum disebabkan karena lokasi wilayah yang memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi dengan perkotaan, sehingga mengikuti perkembangan fisik Kota Malang maupun Kota Batu. Hal inilah yang menyebabkan harga lahan dinilai tinggi karena dekat dengan fasilitas publik. Banyak pula penduduk usia produktif yang bekerja maupun menempuh pendidikan di perkotaan, mengingat Kota Malang merupakan salah satu Kota Pendidikan dengan sarana prasarana yang memadai, serta Kota Batu yang merupakan Kota Wisata, dimana banyak berdiri tempat-tempat wisata maupun perhotelan yang menyerap banyak tenaga kerja, sehingga yang tersisa di Karangploso dan Singosari hanyalah petani dalam kelompok umur tua. Kemudian adanya beban tanggungan keluarga yang tinggi, serta tuntutan biaya kebutuhan hidup lainnya membuat pemilik lahan berhak memutuskan apakah ia akan mempertahankan atau mengalihfungsikan lahannya dengan berbagai pertimbangan.

Adapun permasalahan terkini di Kecamatan Singosari yaitu mengenai pembangunan fasilitas Lanud Abdulrachman Saleh berupa mes, perkantoran,

maupun tempat latihan perang, yang telah mengalihfungsikan lahan pertanian seluas 3.064 meter persegi. Pembangunan tersebut sempat menimbulkan konflik dengan warga, karena TNI AU dianggap telah melakukan penyerobotan tanah dan pengrusakan lahan milik warga dengan mendatangkan alat berat, sementara lahan yang dirusak oleh TNI AU sedang ditanami tanaman yang sudah memasuki masa panen. Adapun konflik tersebut bermula dari saling klaim lahan pertanian seluas 3.064 meter persegi antara warga desa Dengkol dengan TNI AU. Namun, setelah permasalahan tersebut dibawa ke Mahkamah Agung, TNI AU adalah pemilik sah lahan. Di sisi lain, setelah melakukan mediasi dengan warga yang difasilitasi oleh Polres Malang, maka pihak TNI AU bersedia mengganti rugi nilai tanaman warga yang terlanjur rusak (Hanan,2016). Selain itu, adapula permasalahan pembebasan lahan untuk jalan tol Pandaan-Malang (Palang) wilayah Kabupaten Malang yang masih dalam proses hingga saat ini (Rahman,2017).

Kemudian, Kecamatan Karangploso juga merupakan sebuah contoh dari *urban spraw* (perkembangan perumahan tanpa terkontrol), yang mengalami alih fungsi lahan pertanian dengan berkurangnya sawah irigasi sebesar 60,7 Ha dan luas tanah ladang sebesar 0,93 Ha dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Hal ini diikuti oleh meningkatnya kawasan perumahan sebesar 1,91%, perkembangan kegiatan industri sebesar 0,15%, dan perkembangan fasilitas perdagangan dan jasa mencapai 0,39% dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 (Mahiruni,2016). Fenomena alih fungsi lahan memang rawan terjadi karena sampai pada saat ini kebijakan pemerintah masih bersifat ambigu, di satu sisi melarang, namun di sisi lain menghendaki kemajuan pembangunan. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN**

DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)” disertai studi pada Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

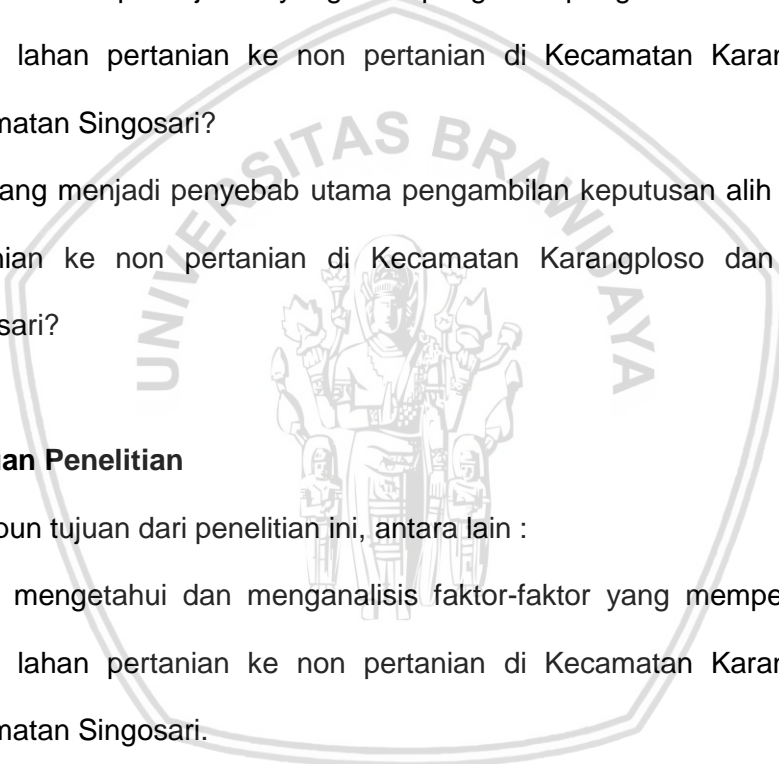
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan penelitian yang menjadi perhatian peneliti, antara lain :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari?
2. Apa yang menjadi penyebab utama pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain :

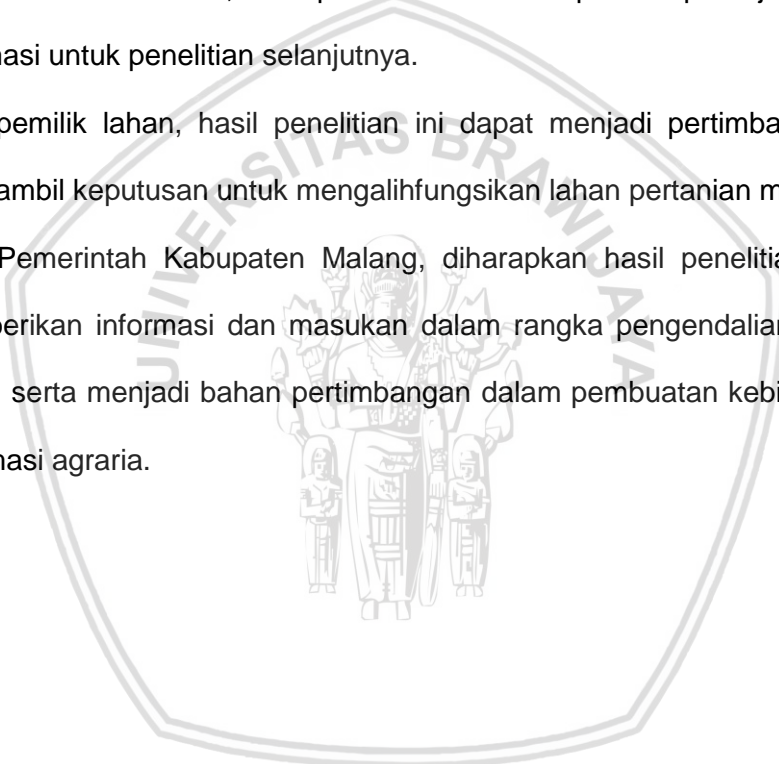
1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab utama pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari.



1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat yang dapat diambil oleh berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana dalam mengaplikasikan ilmu ekonomi konsentrasi sumber daya di bidang lingkungan yang telah dipelajari selama menjalani perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
2. Bagi civitas akademika, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan informasi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi pemilik lahan, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mengalihfungsikan lahan pertanian mereka.
4. Bagi Pemerintah Kabupaten Malang, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan terkait reformasi agraria.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kependudukan Malthusian

Pada tahun 1888, Malthus telah menerbitkan buku mengenai masalah kependudukan dan pemenuhan kebutuhan manusia akan makanan (Mubyarto, 1972). Adanya pertumbuhan penduduk yang berjalan lebih cepat daripada pertambahan produksi bahan makanan, serta kenyataan bahwa lahan pertanian adalah faktor produksi utama yang jumlahnya tetap, membuat Malthus pesimis terhadap masa depan manusia. Sementara itu, keberadaan lahan pertanian juga semakin tergeser oleh pembangunan perumahan, industri, maupun infrastruktur yang perkembangannya jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi pertanian. Malthus juga meramal bahwa akan terjadi malapetaka bagi kehidupan manusia kelak akibat laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan bisa mengancam ketahanan pangan suatu wilayah, karena seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan hidup manusia semakin beragam serta keinginan manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya juga semakin tinggi. Malthus juga menyarankan satu hal supaya dapat terhindar dari malapetaka tersebut yakni dengan melakukan pengawasan atas pertumbuhan penduduk dalam bentuk kebijakan pemerintah, misalnya dengan program keluarga berencana, yaitu suatu program untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan menunda usia kawin serta merencanakan jumlah anggota keluarga dengan pembatasan berupa alat kontrasepsi, sehingga angka kelahiran dapat ditekan.

Kemudian, Malthus juga menyatakan bahwa adanya kecenderungan penduduk untuk bertambah berdasarkan deret ukur yang akan berlipat ganda setiap 30 sampai 40 tahun, sementara itu pada saat yang sama persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung (Todaro, 2013). Hal ini dikarenakan adanya tingkat kepemilikan lahan pertanian oleh rumah tangga petani maupun perusahaan pertanian yang semakin rendah, sehingga kontribusinya terhadap produksi pangan juga semakin menurun.

2.1.2 Teori Sewa Tanah Diferensial Ricardo

Teori ini berasal dari Adam Smith yang kemudian dikembangkan oleh David Ricardo. Menurut Ricardo, tinggi rendahnya sewa tanah disebabkan oleh perbedaan kesuburan tanah, artinya tanah yang semakin subur akan semakin tinggi pula biaya sewanya. Hal ini dikarenakan tanah yang subur membuat perkembangan tanaman menjadi lebih cepat dengan jumlah *input* yang digunakan juga lebih sedikit, sehingga pada akhirnya hasil yang didapatkan pada tanah yang subur akan lebih banyak. Namun, yang terjadi adalah lahan pertanian subur (produktif) telah beralihfungsi menjadi bangunan karena desakan pertumbuhan penduduk yang cepat, meskipun alih fungsi di lahan produktif telah dilarang oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 Pasal 35 yang menyatakan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Kemudian, ketika petani beralih untuk mencoba mengolah lahan yang gersang, yang terjadi justru biaya *input* menjadi semakin tinggi serta membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pengolahan lahan subur. Adapun dalam teori ini, David Ricardo hanya memperhitungkan tinggi rendahnya sewa tanah berdasarkan tingkat kesuburan tanah, dan belum memperhitungkan lokasi tanah yang juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya sewa tanah.

omian. Suparmoko (1997), juga mengatakan bahwa nilai
biasanya terdapat di lokasi perdagangan, industri, pemukin
maupun sarana pendidikan, sehingga hal tersebut berpo
cam tanah di sekitarnya yang berakibat terjadinya kecende
han.

2.1: Land Rent berdasarkan Teori Lokasi Von Thunen

The graph shows the relationship between land rent and distance from the market. The vertical axis is labeled 'Rp' (Rent per unit of land). The horizontal axis represents distance from the market. Two downward-sloping lines represent different land uses: 'Land Rent P1' (higher rent) and 'Land Rent P2' (lower rent). A horizontal line labeled 'Biaya Transport' (Transport Cost) intersects the 'Land Rent P1' line at point 'T1' and the 'Land Rent P2' line at point 'T2'. The area between the two rent lines and to the left of T1 is labeled 'Land Rent P1'. The area between the two rent lines and between T1 and T2 is labeled 'Land Rent P2'. The area to the right of T2 is labeled 'Land Rent P1'.

Sumber : Suparmoko, 1997

K dan K1 : jarak antara pusat kota dengan lokasi
P1 dan P2 : harga sewa tanah
T1 dan T2 : biaya transportasi
O : pusat kota

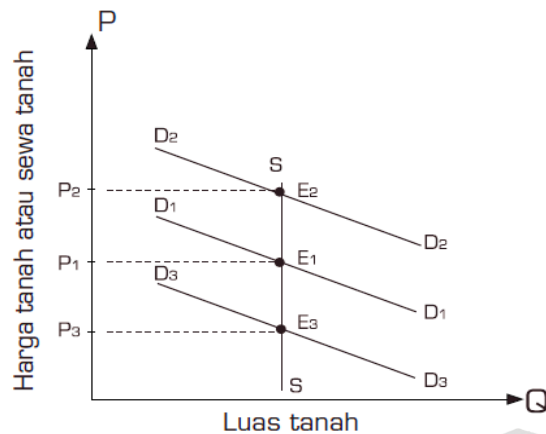
O : pusat kota

Gambar 2.1 secara ringkas dapat dijelaskan bahwa harga sewa tanah yang paling mahal adalah di dekat pusat perekonomian dan akan semakin rendah apabila semakin jauh dengan pusat perekonomian. Hal ini juga diikuti oleh biaya transportasi yang semakin tinggi apabila jarak antara lokasi dengan pusat kota semakin jauh.

2.1.4 Teori Penawaran dan Permintaan Lahan

Sebagai bagian dari permukaan bumi, lahan merupakan sumber daya dengan jumlah cadangan yang tetap, artinya penggunaan lahan tidak akan menghabiskan cadangan lahan. Hal ini berbeda dengan sumber daya yang dapat habis atau terbarukan seperti minyak bumi yang apabila digunakan terus menerus selama bertahun-tahun pada akhirnya akan menghabiskan cadangan minyak bumi. Damayanti dan Syah (2009) juga turut berpendapat bahwa tanah/lahan merupakan salah satu faktor produksi yang tidak dapat diproduksi oleh manusia, tetapi diperlukan untuk memproduksi barang lainnya. Oleh karena itu, lahan menjadi sumber utama kekayaan manusia yang digunakan untuk melakukan segala aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Eckert (1990) menjelaskan bahwa tanah/lahan telah banyak dijadikan ladang investasi yang menguntungkan sekaligus dapat mendorong manusia melakukan spekulasi di masa mendatang karena di satu sisi karena aspek ketersediaan lahan, dan di sisi lain permintaan lahan akan semakin bertambah, sehingga mengakibatkan nilai lahan menjadi mahal terutama apabila berdekatan dengan pusat kota.

Pada dasarnya, penawaran terhadap tanah/lahan bersifat inelastis sempurna, artinya terjadi apabila penawaran tidak bisa berubah atau tetap meskipun harga mengalami fluktuasi (naik/turun). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini mengenai pembentukan harga tanah atau sewa tanah.

Gambar 2.2: **Pembentukan Harga Tanah atau Sewa Tanah**

Sumber : Suparmoko, 1997

Harga tanah terjadi apabila tanah dijual, sedangkan harga sewa terjadi apabila tanah disewakan. Berdasarkan Gambar 2.2 di atas, kurva penawaran tanah SS tegak lurus menunjukkan bahwa jumlah/luas tanah bersifat tetap, artinya tidak dapat ditambah apabila harga tanah atau sewa tanah naik dan tidak dapat dikurangi apabila harga tanah atau sewa tanah turun. Sedangkan kurva permintaan tanah D_1D_1 memotong kurva penawaran tanah SS yang menyebabkan terjadinya titik keseimbangan di E_1 dengan harga keseimbangan atau sewa keseimbangan P_1 . Apabila terjadi peningkatan permintaan tanah, maka kurva permintaan tanah akan bergeser ke atas menjadi kurva D_2D_2 , sehingga titik keseimbangan berubah menjadi E_2 dengan harga keseimbangan atau sewa keseimbangan sebesar P_2 . Namun, apabila terjadi penurunan permintaan tanah, maka kurva permintaan akan bergeser ke bawah menjadi D_3D_3 , sehingga titik keseimbangan berada pada E_3 dengan harga keseimbangan atau sewa keseimbangan sebesar P_3 .

2.1.5 Pertanian dan Lahan Pertanian

Mubyarto (1972), telah mendefinisikan pertanian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pertanian dalam arti sempit didefinisikan sebagai sebuah pertanian rakyat (misalnya usaha pertanian keluarga) yang memproduksi bahan makanan utama seperti beras, palawija (jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian) serta tanaman-tanaman hortikultura yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan, yang biasanya dibudidayakan di sawah, ladang, maupun pekarangan. Sedangkan pertanian dalam arti luas mencakup beberapa bidang, antara lain: pertanian rakyat atau disebut pertanian dalam arti sempit, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan.

Suatu lahan dengan permukaan yang rata secara fisik dan berpetak-petak dibatasi oleh pematang, memiliki saluran untuk menahan maupun menyalurkan air yang dinamakan irigasi, serta biasanya ditanami padi, palawija, atau tanaman budidaya lainnya, disebut sebagai lahan pertanian. Menurut Badan Pusat Statistik (2012), lahan dibedakan menjadi dua jenis menurut penggunaannya yaitu lahan pertanian dan bukan pertanian. Kemudian, lahan pertanian dibedakan lagi menjadi lahan sawah dan bukan sawah. Adapun lahan sawah meliputi sawah dengan sistem irigasi, tadah hujan, pasang surut, dan lain-lain, sedangkan lahan bukan sawah meliputi kebun, ladang, hutan rakyat, rumput, lahan tidur (lahan sementara tidak diusahakan), dan sebagainya. Sedangkan lahan bukan pertanian terdiri dari danau, sungai, rawa-rawa, bangunan, rumah, jalan, lahan tandus, serta hutan negara.

2.1.6 Konversi Lahan Sawah

Iqbal dan Sumaryanto (2007), berpendapat bahwa lahan pertanian yang paling rentan terhadap ancaman konversi adalah lahan sawah. Konversi lahan ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

- (1) Penduduk di pedesaan mayoritas bekerja di sawah daripada lahan kering, sehingga tekanan jumlah penduduk menyebabkan sawah yang menjadi tujuan konversi.
- (2) Lokasi daerah pesawahan yang berdekatan dengan daerah perkotaan.
- (3) Adanya dampak dari pola pembangunan di masa lalu, yakni infrastruktur di wilayah persawahan umumnya lebih baik daripada di wilayah lahan kering.
- (4) Pembangunan pemukiman, industri, dan lain-lain cenderung dilakukan di wilayah bertopografi datar, yang mana daerah tersebut didominasi oleh areal persawahan.

Menurut Irawan (2005), penyebab utama alih fungsi lahan adalah pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi yang menjadi target alih fungsi lahan, yang secara langsung akan meningkatkan aksesibilitas di lokasi tersebut, sehingga dapat mendorong pengembangan industri dan pemukiman oleh para investor. Hal ini yang mengakibatkan harga lahan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan lahan oleh investor, sehingga itu akan menjadi tawaran yang cukup menggiurkan bagi petani untuk menjual lahannya. Pada dasarnya, konversi lahan pertanian ke non pertanian dapat terjadi secara alami maupun instan. Konversi lahan secara alami lazimnya disebabkan oleh fungsi sawah yang tidak optimal, yakni akibat kualitas irigasi yang buruk maupun usaha tani yang kurang menguntungkan. Sedangkan konversi lahan secara instan biasanya berlangsung di wilayah sekitar urban, yakni berubah menjadi lokasi pemukiman atau kawasan industri. Rustiadi dan Ernan (2010) juga turut berpendapat mengenai alih fungsi lahan, yaitu suatu bentuk konsekuensi logis dari transformasi perubahan struktur sosial ekonomi sesuai perkembangan zaman yang tercermin dari meningkatnya kebutuhan penggunaan lahan sebagai sarana pertumbuhan ekonomi, sehingga menggeser sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa).

Selain itu, menurut Pakpahan *et al* (1993), faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dapat dibedakan menjadi dua, antara lain :

1. Faktor langsung, yaitu faktor alih fungsi lahan dari sisi petani yang mana dapat secara langsung mempengaruhi keputusan petani. Misalnya: kondisi sosial ekonomi petani, pajak tanah, harga tanah, lokasi tanah.
2. Faktor tak langsung, yaitu faktor alih fungsi lahan dari sisi wilayah dimana tidak secara langsung mempengaruhi keputusan petani. Misalnya: pertumbuhan penduduk yang berpengaruh pada pertumbuhan pembangunan pemukiman dan perubahan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa, sehingga dapat meningkatkan kebutuhan sarana transportasi serta lahan untuk industri.

Adapun pendapat tersebut turut didukung oleh Witjaksono (1996) yang telah menyebutkan lima faktor sosial yang mempengaruhi alih fungsi lahan, yaitu perubahan perilaku, hubungan pemilik dengan lahan, pemecahan lahan, pengambilan keputusan, serta apresiasi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Dua faktor terakhir berhubungan dengan peraturan pemerintah, yang memunculkan sebuah asumsi bahwa pemerintah sebagai abdi masyarakat seharusnya dapat mengayomi dan bertindak sebagai pengendali terjadinya alih fungsi lahan. Winoto (2005) juga turut memaparkan lima faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, antara lain:

1. Faktor kependudukan, yakni adanya peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan permintaan lahan.
2. Faktor ekonomi, yakni tingginya biaya sewa tanah yang diperoleh aktivitas sektor non pertanian daripada sektor pertanian, rendahnya insentif petani, tingginya biaya produksi, harga hasil pertanian yang relatif rendah, serta kebutuhan keluarga petani yang semakin mendesak.

3. Faktor sosial budaya, yakni adanya hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya lahan, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi yang menguntungkan.
4. Perilaku *myopic*, yakni hasrat untuk mencari keuntungan jangka pendek tanpa memperdulikan jangka panjang.
5. Sistem perundang-undangan dan penegakan hukum yang lemah.

Namun, Soekartawi (1988) juga berpendapat bahwa petani yang sudah lama berusaha tani dapat lebih mudah dalam menerapkan teknologi daripada petani pemula, karena pengalaman yang dimiliki di bidang pertanian lebih banyak. Oleh karena itu, hal ini dapat mempengaruhi preferensi petani maupun pemilik lahan dalam melakukan alih fungsi lahan. Selain karena seberapa besar pengalaman yang dimiliki, tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi preferensi petani maupun pemilik lahan. Hal ini dikarenakan pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan petani dalam melaksanakan adopsi dan inovasi. Dalam hal ini, Soekartawi (2005) juga menyatakan bahwa seseorang yang berpendidikan tinggi relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi dan inovasi, sedangkan sebaliknya, mereka yang berpendidikan rendah akan lebih sulit melaksanakan adopsi dan inovasi dengan cepat.

2.1.7 Teori AHP (*Analytical Hierarchy Process*)

AHP merupakan suatu bentuk model pengambilan keputusan multikriteria dengan mengembangkan kerangka berpikir manusia yang meliputi logika, pengalaman, pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimalisasikan ke dalam suatu proses sistematis. Alat utama yang digunakan dalam model berupa sebuah hierarki fungsional dengan *input* utamanya berupa persepsi manusia. Pada dasarnya, AHP berusaha menutupi kekurangan dari model pengambilan keputusan lainnya dengan cara menyusun hierarki untuk memecahkan suatu

permasalahan yang kompleks (Brojonegoro, 1992). *Analytical Hierarchy Process* pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970. Pada umumnya, alat analisis ini digunakan untuk membantu para pemangku kebijakan dalam memilih sebuah alternatif yang memberikan hasil paling mendekati tujuannya. Menurut Triono (2012), teknik ini telah dilakukan oleh para pengambil keputusan sejak lama dalam berbagai preferensi mereka, namun AHP memvisualkan pemikiran maupun preferensi mereka sehingga pemahaman akan situasi keputusan menjadi semakin terarah. Kelebihan dalam model ini yakni AHP memiliki fleksibilitas yang tinggi, terutama dalam pembuatan hierarkinya, sehingga AHP dapat menjaring beberapa tujuan dan kriteria sekaligus dalam sebuah model/hierarkinya. Di sisi lain, AHP juga mampu memecahkan masalah yang memiliki tujuan-tujuan yang berlawanan hingga multi objektif. Oleh karena itu, Saaty (1993) mengatakan bahwa suatu keputusan yang diambil melalui model AHP sudah akan mempertimbangkan berbagai tujuan maupun kriteria yang berbeda bahkan bisa jadi saling bertentangan.

Dalam proses penyusunan model AHP ini, terdapat dua tahapan utama, yaitu penyusunan hierarki (dekomposisi) dan evaluasi hierarki. Brojonegoro (1992) berpendapat bahwa dalam proses ini juga terdapat tiga proses berurutan, yaitu identifikasi level dan elemen, definisi konsep, dan formulasi pertanyaan. Artinya, pertama penyusun harus mengidentifikasi tujuan keseluruhan pembuatan hierarki ini atau masalah yang akan dicari pemecahannya dengan model AHP. Kemudian, menentukan kriteria-kriteria sesuai dengan tujuan tersebut yang dapat berupa syarat-syarat atau keadaan yang sekiranya dapat menunjang tercapainya tujuan yang pada dasarnya masih bersifat umum. Setelah itu, maka perlu dipertimbangkan dalam penambahan sub-sub kriteria di bawah setiap kriteria yakni berupa penjabaran yang lebih detil dari kriteria yang

telah dipaparkan. Terakhir, identifikasi alternatif yang akan dievaluasi di bawah sub-sub kriteria.

Tabel 2.1: **Proses Penyusunan Hierarki**

Tahap Pertama	Identifikasi tujuan keseluruhan pembuatan hierarki
Tahap Kedua	Menentukan kriteria pendukung tujuan keseluruhan
Tahap Ketiga	Identifikasi strategi atau alternatif yang akan dievaluasi

Sumber : Brojonegoro, 1992

Setelah menyusun hierarki, proses berikutnya adalah menetapkan kriteria dengan cara membuat tabel perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) antar kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan dengan cara menentukan mana diantara dua yang dianggap penting/ dipilih/ bisa terjadi, serta menentukan berapa kali lebih penting/ dipilih/ bisa terjadi. Seluruh prioritas akan dibandingkan satu sama lain secara berpasangan dengan skala bobot 1 sampai 9. Perlu dipahami bahwa yang dapat melakukan pengisian persepsi ini adalah para pakar yang telah dipilih oleh penyusun hierarki.

Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode AHP dalam pemecahan permasalahan dan pengambilan keputusan, antara lain :

- Kelebihan :
 - a. Kesatuan, yakni model AHP hanya satu/tunggal dan mudah dimengerti
 - b. Kompleksitas, yakni AHP dapat memecahkan persoalan kompleks
 - c. Saling ketergantungan, yakni AHP tidak memaksakan pemikiran linier
 - d. Penyusunan hierarki, yakni AHP mencerminkan kecenderungan alami macam-macam preferensi manusia dan dikelompokkan dalam suatu tingkatan
 - e. Pengukuran, yakni AHP memberi skala dalam mengukur model untuk menetapkan prioritas

- f. Konsistensi, yakni AHP melacak konsistensi logis dari beberapa pertimbangan dalam menentukan prioritas
- g. Sintesis, yakni AHP menuntun ke suatu taksiran detil tentang kebaikan setiap alternatif
- h. Tawar-menawar, yakni AHP mempertimbangkan beberapa prioritas relatif dari berbagai faktor untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan masing-masing orang
- i. Penilaian dan konsensus, yakni AHP mensintesis suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian yang berbeda-beda
- j. Pengulangan proses, yakni AHP memungkinkan orang memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan
- Kekurangan :
 - a. AHP tidak dapat diterapkan pada suatu perbedaan sudut pandang responden yang bersifat ekstrim
 - b. Metode analisis ini mensyaratkan pada sekelompok ahli sesuai dengan topik yang diangkat dalam pengambilan keputusan
 - c. Responden yang dipilih harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang permasalahan

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dalam kaitannya dengan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dengan metode AHP. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini telah dijelaskan pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Gatot Subroto dan Cahyono Susetyo (2016)	IDENTIFIKASI VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN JOMBANG, JAWA TIMUR	Kemampuan lahan, meliputi topografi, jenis tanah, rawan bencana, curah hujan, kelerengan, ketinggian Infrastruktur dasar, meliputi sistem irigasi, akses jalan,.. Produktivitas, meliputi kesatuan hamparan lahan, intensitas penanaman, dan ketersediaan air	metode pengumpulan data primer Analisis Stakeholders dan Analytical Hierarchy Process (AHP)	Bobot faktor terbesar adalah faktor produktivitas dengan nilai 0.573, sedangkan bobot variabel terbesar adalah sistem irigasi dengan nilai sebesar 0.854
2	Umi Pudji Astuti, Wahyu Wibawa dan Andi Ishak (2012)	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALIH FUNGSI LAHAN PANGAN MENJADI KELAPA SAWIT DI BENGKULU : KASUS PETANI DI DESA KUNGKAI BARU	Aspek ekonomis, meliputi harga jual tanaman pangan yang rendah, panen sawit dilakukan kontinyu setiap 2 minggu, keuntungan berkebun sawit lebih tinggi, harga sawit lebih terjangkau/stabil, biaya pemeliharaan tanaman sawit lebih rendah Aspek lingkungan, meliputi kecocokan lahan untuk kebun sawit, ancaman hama dan penyakit pada tanaman pangan, kondisi irigasi tidak mendukung, posisitarwar petani sawit lebih tinggi, tenaga kerja kebun sawit lebih sedikit Aspek teknis, meliputi anaman sawit berumur panjang, proses pascapanen tanaman pangan lebih sulit, teknik budidaya sawit lebih mudah, kesulitan pengadaan pupuk untuk tanaman pangan	Metode pengumpulan data melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pengurus gapoktan, petani, dan wanita tani. Kemudian dianalisis dengan Analysis Hierarchy Process (AHP)	Alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Kungkai Baru, karena pertimbangan faktor-faktor ekonomis (58,4%), lingkungan (22,2%), dan teknis (19,4%).

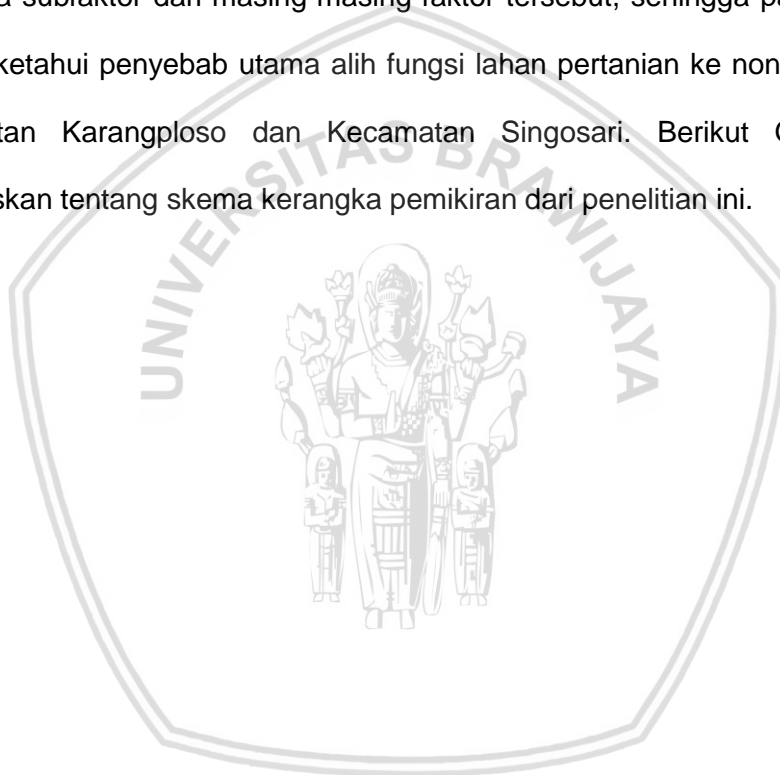
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
3	Sucihati-ningsih Dian Wisika Prajanti (2014)	STRATEGY FOR CONTROLLING AGRICULTURAL LAND CONVERSION OF PADDY BY USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN CENTRAL JAVA	<p>Aspek hukum : Peraturan tentang mekanisme konversi, tindakan ekspansi lahan pertanian, perlindungan lahan</p> <p>Aspek ekonomi : Insentif dan disinsentif</p> <p>Aspek zonasi : Pengelompokan dan perluasan perkotaan</p>	<p><i>purposive sampling</i> dengan mewawancarai 12 responden</p>	<p>aspek hukum yang paling menjadi prioritas, selanjutnya aspek zonasi, dan terakhir aspek ekonomi, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan untuk menegakkan peraturan agraria secara tegas mengenai mekanisme pengelolaan hak atas tanah</p>
4	Sumiyati, Lilik Sutiarsa, I Wayan Windia, Putu Sudira	APLIKASI ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) UNTUK PENENTUAN STRATEGI PENGEMBANGAN SUBAK	<p>Pengembangan subak sebagai daerah agroekowisata, pengembangan subak sebagai daerah pertanian, pengembangan subak sebagai daerah wisata massal</p>	<p>Membuat matriks SWOT untuk menentukan berbagai alternatif strategi Kemudian pemilihan alternatif strategi solusi yang dianggap paling sesuai, dilakukan dengan metode <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i></p>	<p>Pengembangan subak sebagai daerah agroekowisata memiliki skor tertinggi (0,471) dibandingkan dengan alternatif strategi pengembangan subak sebagai daerah pertanian (0,372) maupun sebagai daerah wisata massal (0,157).</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
5	Yuliya Mahdalena Hidayat, Dhemi Harlan, dan Winskayati (2014)	ANALISIS PENGGUNAAN AIR IRIGASI DENGAN TEKNIK ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS DI WANIR KABUPATEN BANDUNG	Aspek teknis yang meliputi OPERASI (3.08) PEMELIHARAAN (3.05) KOORDINASI (3.03) Aspek ekonomi yang meliputi PRODUKTIVITAS PERTANIAN (3.12) PENDANAAN (3.03) KESEJAHTERAAN PETANI (3.01) Aspek lingkungan yang meliputi PELESTARIAN SUMBER AIR (3.12) PENGHEMATAN AIR (3.03) PENYIMPANAN AIR (3.01)	Perancangan input untuk skenario melalui AHP diperoleh dengan menghimpun data primer atau sampling di 13 Desa yang berada dalam wilayah DI Wanir dengan cara menyebar kuesioner.	Pada saat kekurangan, cara pemberian air sebaiknya dilakukan secara bergiliran. Penelitian ini cukup konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu jadwal tanam efektif untuk penggunaan air irigasi yang optimal adalah bulan Oktober.
6	Wirongro Duangjai, Dietrich Schmidt-Vogt, Rajendra P. Shrestha (2015)	FARMER'S LAND USE DECISION-MAKING IN THE CONTEXT OF CHANGING LAND AND CONSERVATION POLICIES	Perubahan peraturan dan kebijakan lahan dari tahun 1950 sampai dengan periode sekarang dengan dibagi menjadi tiga periode, antara lain periode pertama sebelum tahun 1960, periode kedua pada tahun 1961-1996, dan periode ketiga pada tahun 1997-sekarang.	metode analisis data berpedoman pada kerangka kerja <i>Intitutio-nal Analysis and Develop-ment</i> (IAD)	Proses pembuatan keputusan petani dipengaruhi oleh keputusan hierarki otoritas yang lebih tinggi yakni para pemangku kepentingan, sedangkan para petani umumnya tidak berperan aktif dalam proses perubahan kebijakan, artinya mereka hanya menerima hasil yang telah ditetapkan

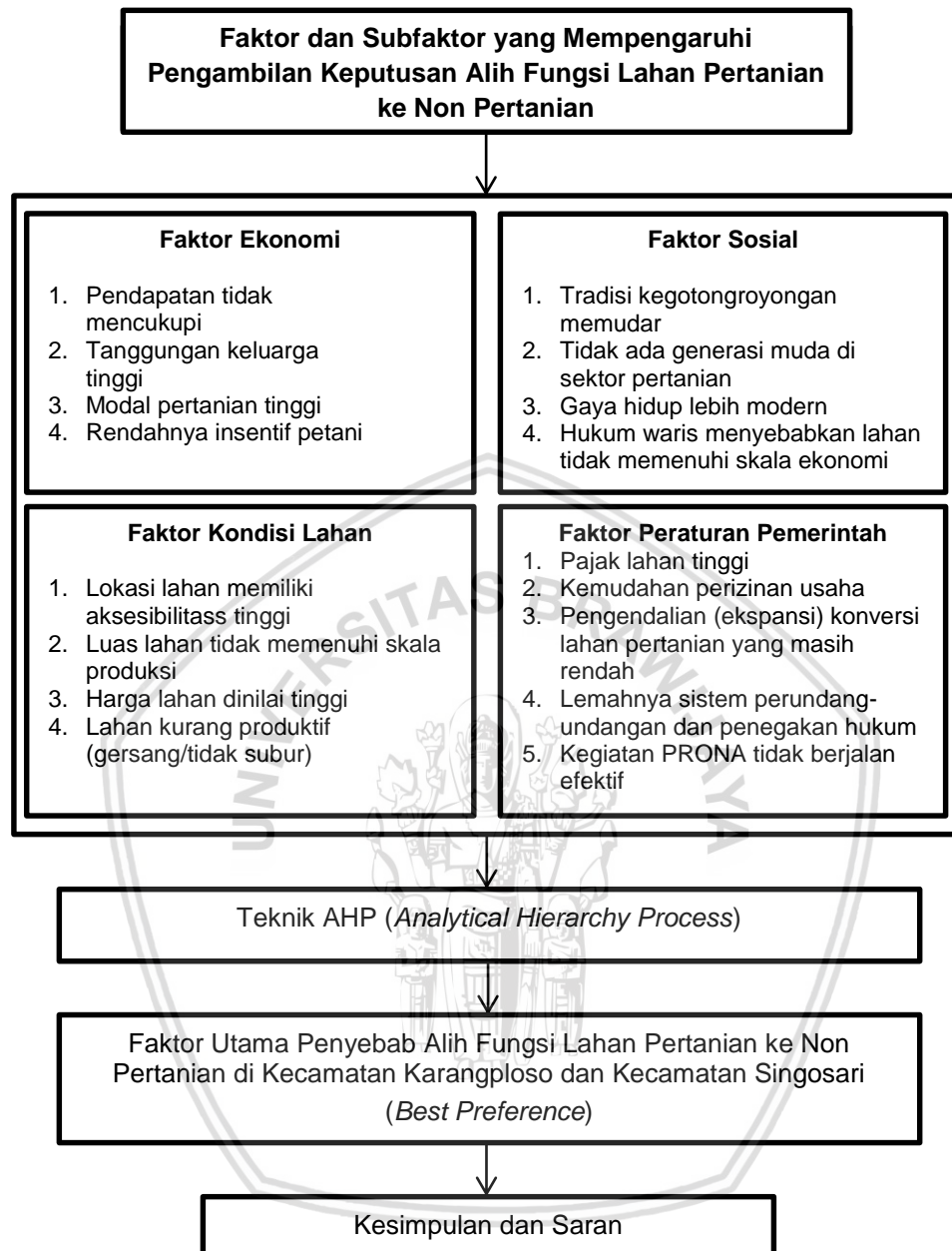
Sumber : Berbagai sumber, 2018

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur penelitian yang dipakai oleh seorang peneliti. Dalam kerangka pemikiran ini berisi gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari antara lain faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kondisi lahan, dan faktor peraturan pemerintah, dengan beberapa subfaktor dari masing-masing faktor tersebut, sehingga pada akhirnya dapat diketahui penyebab utama alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari. Berikut Gambar 2.3 menjelaskan tentang skema kerangka pemikiran dari penelitian ini.



Gambar 2.3: Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis, 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei. Metode penelitian survei merupakan pengambilan data berdasarkan survei dengan menggunakan alat bantu yaitu kuesioner. Adapun dalam penelitian ini instrumen utama yang digunakan untuk pengambilan data adalah melalui wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas dapat diklasifikasikan, konkret, teramati, dan dapat diukur hubungan variabelnya yang bersifat sebab akibat, yang mana data dalam penelitian ini berupa angka dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono, 2015).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Adapun pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas dukungan letak geografis Karangploso dan Singosari yang dekat dengan pusat Kota Malang maupun Kota Batu yang mengalami pertumbuhan sangat cepat, sehingga memberikan implikasi terjadinya perubahan tata guna lahan. Kemudian, kenyataan di lapangan juga menyebutkan bahwa petani sudah banyak yang beralih profesi karena beberapa lahan dialihfungsikan menjadi lahan terbangun, seperti kawasan perumahan, perdagangan, industri, jalan tol Pandaan-Malang, bahkan pangkalan TNI AU. Kemudian, adanya rencana pemerintah yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2016-2021 yang menjadikan

kedua kecamatan ini berada pada wilayah pengembangan (WP 1). Berdasarkan fakta tersebut, maka lokasi ini dirasa relevan dengan tujuan penelitian.

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel penelitian adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan definisi operasional variabel merupakan penjabaran dari masing-masing variabel secara jelas, lengkap dan terperinci. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini beserta pengukurannya, antara lain :

1. Faktor ekonomi (*Economy*)

Faktor ekonomi merupakan suatu keadaan ekonomi masyarakat yang dapat mempengaruhi keputusan pemilik lahan terhadap lahan-lahan pertanian. Faktor ekonomi di sini meliputi 4 kriteria yang diukur dengan Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan, antara lain :

- (1) Pendapatan tidak mencukupi (E1)
- (2) Tanggungan keluarga tinggi (E2)
- (3) Model pertanian tinggi (E3)
- (4) Rendahnya insentif petani (E4)

2. Faktor sosial (*Social*)

Faktor sosial merupakan suatu pandangan mengenai nilai-nilai budaya dalam kemasyarakatan yang dapat mempengaruhi keputusan pemilik lahan terhadap lahan-lahan pertanian. Faktor sosial di sini meliputi 4 kriteria yang diukur dengan Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan, antara lain :

- (1) Tradisi kegotongroyongan memudar (S1)
- (2) Tidak ada generasi muda di sektor pertanian (S2)
- (3) Gaya hidup lebih modern (S3)
- (4) Hukum waris menyebabkan lahan tidak memenuhi skala ekonomi (S4)

3. Faktor kondisi lahan (*Land*)

Faktor kondisi lahan merupakan suatu pandangan mengenai keadaan lahan yang dapat mempengaruhi keputusan pemilik lahan terhadap lahan-lahan pertanian. Faktor kondisi lahan di sini meliputi 4 kriteria yang diukur dengan Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan, antara lain :

- (1) Lokasi lahan memiliki aksesibilitas tinggi (L1)
- (2) Luas lahan tidak memenuhi skala produksi (L2)
- (3) Harga lahan dinilai tinggi (L3)
- (4) Lahan kurang produktif (gersang/tidak subur) (L4)

4. Faktor peraturan pemerintah (*Government*)

Faktor peraturan pemerintah merupakan suatu pandangan mengenai peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi keputusan pemilik lahan terhadap lahan-lahan pertaniannya. Faktor peraturan pemerintah di sini meliputi 4 kriteria yang diukur dengan Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan, antara lain :

- (1) Pajak lahan tinggi (G1)
- (2) Kemudahan perizinan usaha (G2)
- (3) Pengendalian (ekspansi) konversi lahan pertanian yang masih rendah (G3)
- (4) Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (G4)
- (5) Kegiatan PRONA (Proyek Operasional Nasional Agraria) tidak berjalan efektif (G5)

3.4 Data yang Diperlukan dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan sebagai objek penelitian (Sekaran,2006). Data ini didapat dari wawancara yang

menggunakan alat bantu kuesioner dengan beberapa responden yang telah ditetapkan sebagai informan penelitian. Responden yang akan dimintai datanya adalah Ketua/Pengurus GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) dan Ketua Kelompok Tani, kemudian Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan, serta Pengamat Pertanian yang mengetahui kondisi mengenai lahan yang telah dialihfungsikan di desa/kelurahan setempat di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari. Sementara data sekunder adalah data yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti, sehingga penelitian harus melalui pihak lain (Sugiyono, 2015). Adapun data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui dokumentasi Kantor Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, Dinas Pertanahan Kabupaten Malang, serta literatur-literatur penunjang lainnya seperti buku, jurnal, maupun artikel dari internet yang berkaitan dengan topik penelitian ini untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai gambaran umum lokasi penelitian serta data-data lain yang dianggap dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Tabel 3.1: **Pengumpulan Data Primer**

No	Tujuan	Responden	Jumlah	Instrumen
1	Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator PPL (2) • Pengamat Pertanian (2) 	4 orang	Kuesioner kombinasi, wawancara, observasi, dan dokumentasi
2	Penentuan urutan prioritas strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dengan metode AHP	<ul style="list-style-type: none"> • PPL (7) • Ketua/Pengurus GAPOKTAN (6) • Ketua Kelompok Tani (3) 	16 orang	Kuesioner kombinasi

Sumber : Observasi Penulis, 2018

3.5 Cara Pengambilan Data

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara petugas dengan responden sebagai objek penelitian. Biasanya petugas membawa daftar pertanyaan, untuk diisi dengan keterangan-keterangan yang di peroleh dengan wawancara (Supranto,1997). Dalam teknik wawancara, peneliti dapat membawa daftar pertanyaan (kuesioner) untuk diisi dengan keterangan-keterangan yang akan diperoleh dalam wawancara tersebut. Pada penelitian ini responden yang dimaksudkan adalah Ketua/Pengurus GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) dan Ketua Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan, serta Pengamat Pertanian yang mengetahui kondisi mengenai lahan yang telah dialihfungsikan di desa/kelurahan setempat di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari, dengan daftar pertanyaan yang mencakup seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan variabel penelitian berupa catatan, transkrip, buku-buku, jurnal, internet dan literatur-literatur terkait. Dokumentasi ini dapat diperoleh dari Kantor Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, serta Dinas Pertanahan Kabupaten Malang.

3.6 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono,2015). Populasi

dalam penelitian ini adalah para informan mengenai kondisi pertanian di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang diteliti. Menurut Saaty (1993), penerapan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) mengutamakan kualitas data dari responden, bukan tergantung pada kuantitasnya. Maka dari itu, penilaian AHP secara akurat memerlukan pakar sebagai responden dalam pengambilan keputusan dan pemilihan alternatif. Para pakar yang dimaksud adalah orang-orang yang kompeten yang menguasai, serta berpengaruh dalam pengambilan keputusan maupun mengetahui segala informasi yang dibutuhkan. Saaty (1993) juga menyebutkan bahwa ketika akan menentukan jumlah responden dalam metode AHP tidak memiliki perumusan tertentu, namun hanya terdapat batas minimum yakni dua orang.

Adapun pemilihan responden dilakukan dengan teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*, artinya pengambilan sampel dilakukan secara sengaja sesuai dengan tujuan peneliti. Sedangkan responden memiliki kriteria mewakili bidang keahlian dan diprioritaskan kepada pakar yang disyaratkan dalam penggunaan AHP (*Analytical Hierarchy Process*) cukup beberapa orang (Saaty, 1993). Para pakar tersebut adalah para Ketua/Pengurus GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) dan Ketua Kelompok Tani, kemudian Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan, serta Pengamat Pertanian yang mengetahui kondisi mengenai lahan yang telah dialihfungsikan di desa/kelurahan setempat di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari. Sampel dalam wawancara ini berjumlah 20 responden, dengan pembagian 10 responden di Kecamatan Karangploso dan 10 responden di Kecamatan Singosari. Adapun dasar pertimbangan dalam penentuan responden pada penelitian ini digunakan kriteria sebagai berikut:

1. Ketersediaan informan/responden dalam memberikan pendapatnya

2. Memiliki reputasi, kedudukan, serta dapat menunjukkan kredibilitasnya sebagai informan/ahli
3. Memiliki banyak pengalaman di bidangnya

Tabel 3.2: **Penentuan Responden Penelitian**

No	Nama Responden	Kecamatan	Pekerjaan/Jabatan
1	Moh. Zamil	Singosari	Koordinator PPL
2	Erdi Prang Basuki R.	Singosari	PPL
3	Rizaludin Idi Amin	Singosari	PPL
4	Sugito	Singosari	PPL
5	Septiana Dwi Hapsari	Singosari	PPL
6	Sri Ismiyati	Singosari	PPL
7	Purwanto	Singosari	Pengamat Pertanian
8	Sholikhan	Singosari	Bendahara GAPOKTAN
9	Achmad Badri Rofi'i	Singosari	Ketua GAPOKTAN
10	Fahrur Rozzy	Singosari	Ketua GAPOKTAN
11	Chriesna Cutha Radtra	Karangploso	Koordinator PPL
12	Hariyanto	Karangploso	PPL
13	Catur Sri Wijayanti	Karangploso	PPL
14	Edi Hermanto	Karangploso	Pengamat Pertanian
15	Rohim	Karangploso	Ketua GAPOKTAN
16	Sukriyadi	Karangploso	Ketua GAPOKTAN
17	Rudi	Karangploso	Bendahara GAPOKTAN
18	Bambang Wirawan	Karangploso	Ketua Kelompok Tani
19	Muh. Nur Yasir	Karangploso	Ketua Kelompok Tani
20	Ahmad Junaidi	Karangploso	Ketua Kelompok Tani

Sumber : Observasi Penulis, 2018

3.7 Metode Analisis Data

Analisis merupakan suatu tindakan mengolah data hingga menjadi sebuah informasi yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan

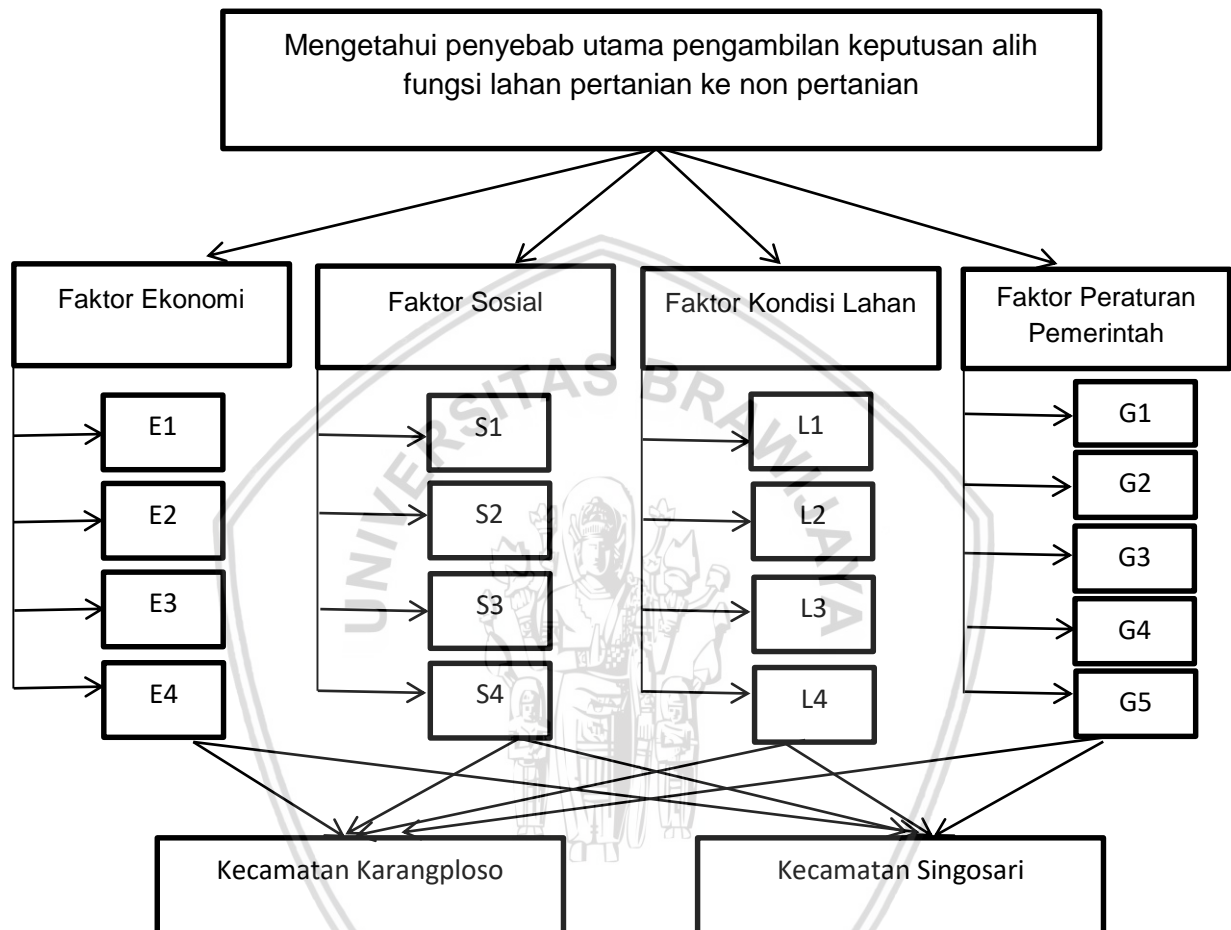
penelitian (Istijanti,2009). Pengolahan data merupakan kegiatan yang paling penting dalam keseluruhan proses penelitian, karena peneliti akan dapat menemukan makna dari data yang berhasil dikumpulkan. Adapun pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*). AHP bertujuan memberi prioritas dari beberapa alternatif ketika beberapa preferensi atau kriteria harus dipertimbangkan. Seperti halnya dalam penelitian ini terdapat empat faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, yaitu faktor ekonomi, sosial, kondisi lahan, dan peraturan pemerintah, serta masing-masing diikuti oleh sub faktor yang mendasari adanya faktor-faktor tersebut. Kemudian, setelah melakukan wawancara dan analisis data, maka dapat diketahui penyebab utama terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari.

Sebelum melakukan analisis, maka dalam teknik AHP harus menyusun struktur hierarki masalah. Masalah penentuan urutan prioritas strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian disusun dalam tiga level hierarki, antara lain:

- Level 0 merupakan tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui penyebab utama pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
- Level 1 merupakan faktor-faktor atau kriteria yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, terdiri dari faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kondisi lahan, dan faktor peraturan pemerintah.
- Level 2 merupakan subfaktor atau subkriteria dari ketiga faktor tersebut yang telah diidentifikasi.
- Level 3 merupakan alternatif, yakni Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari

Adapun rancangan struktur hierarki permasalahan dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 3.1 berikut ini.

Gambar 3.1: **Rancangan Struktur Hierarki Permasalahan**



Sumber : Responden, 2017

Setelah menyusun rancangan struktur hierarki permasalahan, maka langkah kedua membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif pengaruh setiap kriteria terhadap masing-masing tujuan kriteria. Kemudian dilanjut dengan menghitung prioritas dari masing-masing variabel pada level 1 (kriteria) yakni faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kondisi lahan, dan faktor peraturan pemerintah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Membuat perbandingan berpasangan dari masing-masing kriteria

Dalam mengembangkan matriks perbandingan, Thomas L. Saaty mengusulkan skala 9 peringkat untuk membandingkan masing-masing peringkat secara berpasangan berdasarkan kepentingannya seperti pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3: **Skala Kepentingan Aktivitas-aktivitas Secara Relatif**

Skala	Keterangan
1	Sama pentingnya. Dua aktivitas memiliki kontribusi yang sama pada sasaran
3	Suatu aktivitas memiliki kepentingan yang sedikit lebih kuat dibandingkan aktivitas lainnya dalam mencapai sasaran
5	Suatu aktivitas memiliki kepentingan yang lebih kuat dibandingkan aktivitas lainnya dalam mencapai sasaran
7	Suatu aktivitas memiliki kepentingan yang sangat lebih kuat dibandingkan aktivitas lainnya dalam mencapai sasaran
9	Suatu aktivitas memiliki kepentingan yang dominan dibandingkan aktivitas lainnya dalam mencapai sasaran
2,4,6,8	Nilai-nilai yang berada di antara nilai-nilai yang telah disebutkan sebelumnya

Sumber : Thomas L. Saaty, 1993

b. Hasil penilaian responden dirata-rata menggunakan *geometric mean* untuk memilih faktor prioritas/utama. Secara matematis *geometric mean* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$a_{ij} = (Z_1, Z_2, Z_3, \dots, Z_n)^{1/n}$$

Keterangan :

a_{ij} = nilai rata-rata perbandingan berpasangan kriteria a_i dengan a_j
untuk n partisipan

Z_i = nilai perbandingan antara a_i dengan a_j untuk partisipan i , dengan
 $i=1,2,3,...n$

n = jumlah partisipan

- c. Hasil dari setiap perbandingan berpasangan ditampilkan dalam sebuah matriks perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*)
- d. Masing-masing elemen dibagi pada kolom tertentu dengan nilai jumlah kolom tersebut
- e. Hasilnya dinormalisasi untuk memperoleh *vector eigen* matriks dengan menghitung rata-rata jumlah baris terhadap empat kriteria. Adapun *vector eigen* merupakan bobot prioritas keempat kriteria terhadap tujuan.
- f. Kemudian dilanjut dengan menghitung rasio konsistensi dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - (1) Nilai matriks perbandingan awal dikalikan dengan bobot
 - (2) Jumlah baris dikalikan dengan bobot
 - (3) Menghitung λ_{maks} dengan menjumlahkan hasil perkalian di atas dibagi dengan n

$$\lambda_{maks} = \frac{\sum VE}{n}$$

- (4) Menghitung indeks konsistensi (CI)

Hal ini sangat penting untuk mengetahui konsistensi dari sebuah persepsi dalam suatu pengambilan keputusan. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$CI = (\lambda_{maks} - n) / (n - 1)$$

Keterangan :

CI = indeks konsistensi

λ_{maks} = *eigvalue* maksimum

n = orde matriks

(5) Menghitung rasio konsistensi

Kemudian, AHP juga mengukur konsistensi menyeluruh dari beberapa pertimbangan melalui rasio konsistensi dengan perhitungan sebagai berikut :

$$CR = CI / RI$$

Keterangan :

CR = Rasio Konsistensi

RI = Indeks Random

Jika :

$CR < 0,1$ = nilai perbandingan berpasangan pada matriks kriteria yang diberikan konsisten

$CR > 0,1$ = nilai perbandingan berpasangan pada matriks kriteria yang diberikan tidak konsisten. Sehingga apabila tidak konsisten, maka pengisian nilai- nilai pada matriks berpasangan pada unsur kriteria maupun alternatif harus diulang.

Langkah-langkah di atas untuk menghitung bobot/prioritas masing-masing variabel pada subkriteria (level 2), kemudian untuk menentukan *global priority* dilakukan dengan cara mengalikan *local priority* dari masing-masing subkriteria dengan prioritas kriteria. Kemudian, menghitung bobot/prioritas pada alternatif (level 3) dengan cara membandingkan bobot setiap faktor dengan masing masing subkriteria. Setelah mengetahui bobot dari masing-masing faktor dan subfaktor, kemudian ditentukan alternatif yang akan dipilih. Nilai keseluruhan dari masing-masing faktor yaitu jumlah keseluruhan dari perkalian bobot faktor dengan bobot subfaktor. Jadi, alternatif yang akan dipilih adalah alternatif yang memiliki nilai paling tinggi.

Adapun variabel-variabel yang dikumpulkan akan diuji secara statistik dengan menggunakan program *microsoft office excel* yang merupakan perhitungan manual dan mampu memberikan hasil tepat dan akurat dalam melakukan identifikasi pengolahan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian bertempat di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Adapun pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada topik penelitian yang menekankan pada alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang terjadi di Kabupaten Malang, sedangkan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso merupakan dua kecamatan yang mengalami alih fungsi lahan pertanian yang besar karena letak geografisnya yang dekat dengan perkotaan dengan pertumbuhan yang cepat, yakni Kota Malang dan Kota Batu. Adapun Kota Malang yang dikenal sebagai Kota Pendidikan dan Kota Batu juga dikenal sebagai Kota Wisata, menyebabkan masyarakat kerap berdatangan ke dua kota tersebut.

4.1.1 Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan salah satu dari 38 Kota/Kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur, serta merupakan Kabupaten yang wilayahnya terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi. Adapun luas wilayah Kabupaten Malang yakni 353.486 ha dan jumlah penduduknya sebanyak 2.544.315 jiwa yang tersebar di 33 kecamatan, 378 Desa, dan 12 Kelurahan (Badan Pusat Statistik, 2016). Luas Kabupaten Malang tersebut terbagi atas 3.534,86 km² wilayah daratan dan 557,81 km² lautan. Secara geografis, posisi koordinat Kabupaten Malang terletak antara 112°17',10,90" sampai 122°57',00,00" Bujur Timur dan antara 7°44',55,11" sampai 8°26',35,45" Lintang Selatan.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Malang sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo
- Timur : Kabupaten Lumajang
- Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
- Selatan : Samudra Hindia
- Bagian Tengah (Lingkar Dalam) : Kota Malang dan Kota Batu

Letak wilayah yang sedemikian itu menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini dilihat dari semakin padatnya jalur transportasi utara maupun selatan yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara administratif, Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 1.368 Dusun, 3.183 Rukun Warga (RW) dan 14.869 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2008 telah menetapkan Kecamatan Kepanjen menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang juga telah dikenal sebagai wilayah yang kaya potensi, diantaranya pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga, serta objek-objek wisatanya, mengingat secara geologi Kabupaten Malang ini dibatasi oleh pegunungan yang menjulang tinggi, seperti Gunung Anjasmoro dan Gunung Arjuno di sebelah utara, Gunung Bromo dan Gunung Semeru di sebelah timur, Gunung Kelud di sebelah barat, serta Pegunungan Kapur dan Gunung Kawi di sebelah selatan. Adapun perekonomian di Kabupaten Malang didukung dari sektor pertanian, artinya mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani maupun nelayan, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan dan pesisir pantai, serta sebagian lainnya telah berkembang sebagai masyarakat industri dan perdagangan. Namun, data pada Tabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.3

menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2011-2015.

Tabel 4.1: Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB di Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	11.30	10.92	10.58	10.52	10.41

Sumber : Data diolah RPJMD 2016-2021, 2018

Tabel 4.2: Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB di Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	4.05	3.91	3.89	3.86	3.85

Sumber : Data diolah RPJMD 2016-2021, 2018

Tabel 4.3: Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Perkebunan) Terhadap PDRB di Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	7.25	7.01	6.69	6.66	6.55

Sumber : Data diolah RPJMD 2016-2021, 2018

Apabila kondisi seperti ini dibiarkan berlangsung terus-menerus tanpa adanya pengendalian secara ketat dan konsisten dari pihak pemerintah, maka dikhawatirkan Kabupaten Malang tidak dapat menjadi pemasok pangan utama bagi daerah sekitar. Kemudian peta Kabupaten Malang dengan batasan wilayahnya dapat dilihat dari Gambar 4.1 berikut ini.

Gambar 4.1: **Peta Kabupaten Malang**



Sumber : Pemerintah Kabupaten Malang, 2018

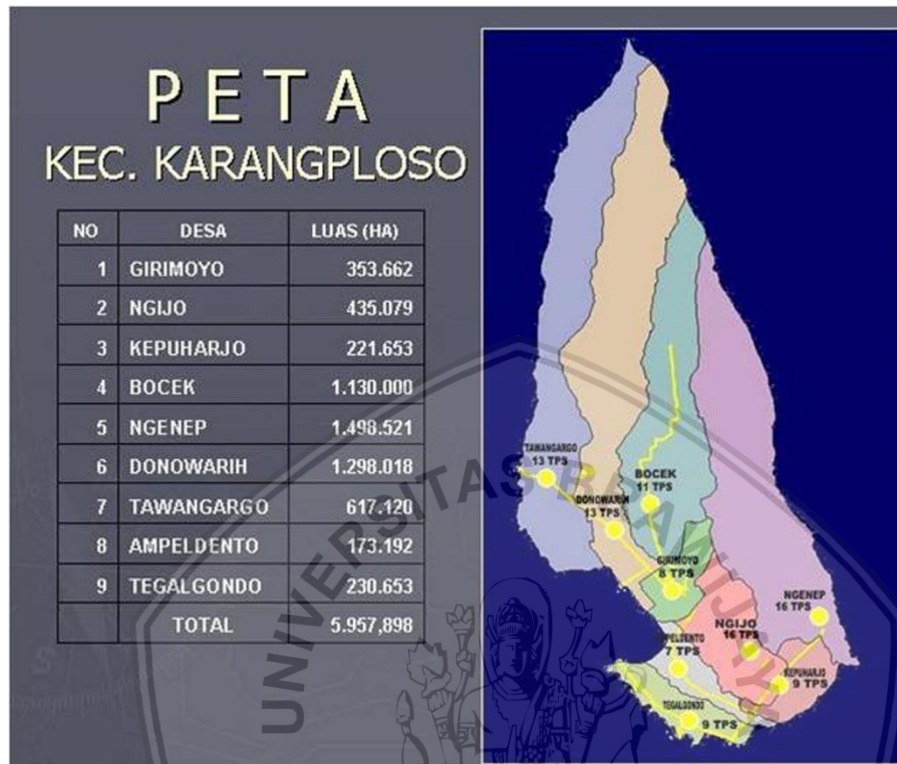
4.1.2 Kecamatan Karangploso

Kecamatan Karangploso merupakan salah satu dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang yang dilalui jalur utama Kota Surabaya dengan Kota Batu.

Batas-batas wilayah kecamatan Karangploso adalah sebagai berikut:

- Timur : Kecamatan Singosari / Kota Malang
- Selatan : Kecamatan Dau / Junrejo Kota Batu
- Barat : Kecamatan Bumiaji Kota Batu
- Utara : Kecamatan Singosari

Gambar 4.2: Peta Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang



Sumber : Kecamatan Karangploso Dalam Angka, 2017

Kemudian luas wilayah Kecamatan Karangploso adalah 5.957.898 Ha yang terdiri atas terbagi menjadi 9 desa (seperti pada Gambar 4.2), 46 dusun, 105 RW, dan 473 RT, serta terbagi atas beberapa wilayah, antara lain :

- Pemukiman : 885.419 Ha
- Sawah : 1.393.900 Ha
- Tegal/Kebun : 1.885.390 Ha
- Perkebunan : 141.000 Ha
- Hutan : 1.516.000 Ha
- Lain-lain : 166.199 Ha

Adapun mayoritas penduduk di Kecamatan Karangploso bermatapencaharian sebagai petani. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4: Jumlah Penduduk beserta Mata Pencaharian Kecamatan Karangploso Tahun 2017

No.	D e s a	Jumlah Penduduk (jiwa)							
		Petani	Buruh Tani	Wira swasta	Pe-ternak	Pe-dagang	Pensiun-an	PNS/TNI/POLRI	Jasa
1.	Girimoyo	147	32	73	5	236	-	-	790
2.	Ngijo	1399	56	724	1	634	32	485	86
3.	Kepuharjo	102	82	210	13	167	71	152	117
4.	Bocek	2438	40	18	215	180	14	58	136
5.	Ngenep	5979	1274	382	13	155	39	99	417
6.	Donowarih	3524	564	5	-	255	52	50	270
7.	Tawangargo	1405	2107	339	95	289	16	34	178
8.	Ampeldento	759	365	5	10	180	25	101	571
9.	Tegalondo	258	186	1239	-	218	85	32	306
	JUMLAH	16079	4738	1966	352	2210	275	1210	3049

Sumber : Kecamatan Karangploso Dalam Angka, 2017

4.1.2.1 Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Karangploso

Berdasarkan penelitian dari Ismail, dkk (2017), masyarakat Kecamatan Karangploso mengalami peningkatan kualitas hidup sejak pemerintah Kabupaten Malang membangun fasilitas pariwisata *Rest Area* di jalan raya alternatif Karangploso dan Kota Batu. Adanya fasilitas tersebut pada dasarnya sebagai dampak langsung dari pesatnya perkembangan pariwisata Kota Batu, sehingga masyarakat Karangploso juga dapat mengambil peluang akan hal tersebut untuk ikut membuka berbagai usaha di bidang kuliner, cinderamata, taman bermain, dan lain-lain. Hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

Karangploso, serta berpotensi untuk menyerap tenaga kerja apabila diperlukan. Selain itu, berkembangnya pabrik-pabrik di kecamatan ini juga mempengaruhi mata pencaharian penduduk yang mulanya buruh tani menjadi karyawan pabrik.

4.1.3 Kecamatan Singosari

Kecamatan Singosari juga merupakan salah satu dari 33 Kecamatan di Kabupaten Malang yang terletak pada jarak 11 kilometer ke arah utara dari pusat Kota Malang, dengan luas wilayah 14.876 Ha.

Gambar 4.3: **Peta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang**



Sumber : Kecamatan Singosari Dalam Angka, 2017

Secara geografis letak wilayah Kecamatan Singosari dikelilingi oleh perbukitan/pegunungan membuat Kecamatan Singosari memiliki tanah yang tergolong subur untuk sebagian wilayah tengah sehingga usahatani yang dapat dikembangkan adalah tanaman pangan dan perikanan, sedangkan untuk wilayah barat dan timur baik untuk penanaman hortikultura, peternakan, dan kehutanan.

Adapun perbukitan/pegunungan yang mengelilingi Kecamatan Singosari, antara lain:

- Barat : Gunung Arjuna
- Selatan : Bukit Gelap
- Timur : Gunung Tumpuk Kawasan Tengger
- Utara : Bukit Gondo Mayit

Kemudian, secara administratif Kecamatan Singosari terdiri dari 17 desa/kelurahan (dapat dilihat pada Tabel 4.5), 40 dusun, 143 RW dan 180 RT. Adapun batas-batas administratif Kecamatan Singosari, antara lain :

- Utara : Kecamatan Lawang dan Kabupaten Pasuruan
- Timur : Kecamatan Jabung dan Pakis
- Selatan : Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru Kota Malang
- Barat : Kecamatan Karangploso

Tabel 4.5: Nama Desa/Kelurahan dan Luas Lahan di Kecamatan Singosari

No.	Desa / Kelurahan	Sawah (Ha)	Lahan Kering (Ha)	Total Luas (Ha)
1.	Ds.Lang lang	101,00	448,00	549,00
2.	Ds.Tunjungtirto	147,00	239,60	386,620
3.	Ds.Banjararum	114,00	342,00	456,00
4.	Ds.Watugede	30,00	108,00	138,00
5.	Ds.Dengkol	62,20	852,70	914,90
6.	Ds. Wonorejo	-	602,20	602,20
7.	Ds. Baturetno	35,20	506,30	541,50
8.	Ds.Tamanharjo	78,10	270,80	348,90

No.	Desa / Kelurahan	Sawah (Ha)	Lahan Kering (Ha)	Total Luas (Ha)
9.	Kel. Losari	30,00	89,00	119,00
10.	Kel. Pagentan	73,00	110,00	183,00
11.	Ds.Purwoasri	116,00	170,00	286,00
12.	Ds.Klampok	162,00	1.279,00	1.441,00
13.	Ds.Gunungrejo	139,00	791,00	930,00
14.	Kel.Candirenggo	81,10	306,90	388,00
15.	Ds.Ardimulyo	80,70	332,10	412,80
16.	Ds.Randuagung	172,20	346,10	518,30
17.	Ds. Toyomartoo	95,00	3.063,00	3.158,00
J u m l a h		1.516,50	9.857,50	11.374,00

Sumber : Kecamatan Singosari Dalam Angka, 2017

Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Singosari sebanyak 175.683 jiwa, dengan jenis mata pencaharian tertinggi adalah petani dan pekebun yakni sebesar 16.012 orang. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6: **Jumlah Penduduk beserta Mata Pencaharian Kecamatan Karangploso Tahun 2017**

Pekerjaan	Jumlah (orang)	Pekerjaan	Jumlah (Orang)
Pegawai Negeri Sipil	2.984	Penggali/Penambang	332
TNI /Polri	2.716	Wiraswasta	1.214
Perdagangan	3.643	Buruh Pabrik/Industri	6.296
Petani & Pekebun	16.012	Tenaga Medis / Bidan	47
Peternak	8.087	Dokter	23
Perikanan	107	Pensiunan/Purnawirawan	1.378
Petani Hutan (Pesanggem)	2.626	Jasa	11.949
Buruh Tani	8.890	Lainnya	4.908
Buruh Bangunan	3.745		

Sumber : Kecamatan Singosari Dalam Angka, 2017

4.1.3.1 Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Singosari

Kecamatan Singosari telah direncanakan akan berubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk sektor pariwisata (Kementerian Pariwisata, 2017). Hal ini dikarenakan Kecamatan Singosari kaya akan nuansa dan sejarah, serta berlokasi dekat dengan Bromo Tengger Semeru. Sedangkan wujud dari adanya KEK adalah tersedianya area bisnis, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Kemajuan Kecamatan Singosari yang pesat akan membawa dampak positif terhadap pembangunan ekonomi. Adanya peluang bisnis yang semakin besar dan ketersediaan lapangan pekerjaan memungkinkan masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani beralih profesi karena ada dorongan pekerjaan yang lebih baik, serta adanya fenomena alih fungsi lahan yang tidak terkendali apabila lemahnya pengawasan pemerintah.

4.2 Analisis dan Interpretasi Data

4.2.1 Perbandingan Prioritas Bobot Pada Level 1 (*Criteria*)

Berdasarkan rekapitulasi data hasil penyebaran kuesioner kepada 20 responden yang terbagi atas 10 responden Kecamatan Karangploso dan 10 responden Kecamatan Singosari, yang mana responden telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya, telah didapatkan hasil analisis mengenai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Malang, khususnya di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari. Pada bagian ini, dapat diketahui hasil analisis atas perbandingan prioritas bobot antar faktor, yakni faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kondisi lahan, dan faktor peraturan pemerintah di masing-masing kecamatan. Kemudian, dapat diketahui pula hasil analisis atas perhitungan

prioritas bobot masing-masing faktor dari gabungan dua kecamatan, dan yang terakhir adalah hasil analisis atas perbandingan prioritas bobot antar kecamatan, yakni Kecamatan Karangploso dan Kecamatan pada masing-masing faktor. Adapun *output* dari seluruh hasil analisis pada bagian ini adalah faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di masing-masing kecamatan, yakni Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari, kemudian faktor utama dari gabungan dua kecamatan ini, dan yang terakhir adalah perbandingan antara dua kecamatan ini dari masing-masing faktor.

Tabel 4.7: **Perhitungan Prioritas Bobot Kriteria Kecamatan Karangploso**

	E	S	L	G	Jumlah	Prioritas Bobot
E	0,100	0,167	0,063	0,107	0,436	0,109
S	0,100	0,167	0,188	0,179	0,633	0,158
L	0,300	0,167	0,188	0,179	0,833	0,208
G	0,500	0,500	0,563	0,536	2,098	0,525

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Pada Tabel 4.7 di atas diperoleh nilai prioritas bobot untuk masing-masing faktor di Kecamatan Karangploso. Hasil di atas menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Karangploso adalah faktor peraturan pemerintah, dengan nilai prioritas bobot tertinggi yaitu 0,525. Kemudian diikuti oleh faktor kondisi lahan dengan nilai prioritas bobot 0,208, faktor sosial dengan nilai prioritas bobot 0,158, serta yang terakhir adalah faktor ekonomi dengan nilai terendah yaitu 0,109. Nilai dari keempat faktor tersebut adalah konsisten, karena hasil analisa menunjukkan nilai *consistency ratio* (CR) sebesar -1,019, dimana syarat CR adalah $<0,1$.

Opini responden dengan memilih faktor peraturan pemerintah sebagai faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Karangploso sangatlah logis karena responden menganggap bahwa pemerintah mudah dalam memberikan izin usaha, baik perumahan, perkantoran, maupun pabrik. Kemudian, adanya pengendalian alih fungsi lahan pertanian masih belum dilakukan secara efektif. Pada dasarnya pajak lahan di kecamatan ini tergolong rendah, namun pengendalian alih fungsi lahan pertanian masih belum dilakukan secara efektif. Kecamatan Karangploso tergolong pada kecamatan yang mengalami wilayah pengembangan (WP I) yang berorientasi ke Kota Malang, karena akan ada pengembangan jalan Malang-Batu (RPJMD 2016-2021, 2018). Baiq Rindang Aprildahani, pakar Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya (2016), menyampaikan bahwa pengendalian yang hanya memaksakan kebijakan, baik dalam tata ruang maupun alih fungsi lahan pertanian tidak akan berjalan secara efektif karena pelaku selalu mendapat celah dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Tabel 4.8: **Perhitungan Prioritas Bobot Kriteria Kecamatan Singosari**

	E	S	L	G	Jumlah	Prioritas Bobot
E	0,375	0,375	0,375	0,375	1,500	0,375
S	0,125	0,125	0,125	0,125	0,500	0,125
L	0,125	0,125	0,125	0,125	0,500	0,125
G	0,375	0,375	0,375	0,375	1,500	0,375

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh nilai prioritas bobot untuk masing-masing kriteria di Kecamatan Singosari. Hasil di atas menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Singosari adalah faktor ekonomi dan faktor peraturan pemerintah, dengan nilai prioritas bobot yang sama yaitu 0,375. Kemudian diikuti

oleh faktor sosial dan faktor kondisi lahan dengan nilai prioritas bobot yang juga sama yaitu 0,125. Nilai dari keempat faktor tersebut adalah konsisten, karena hasil analisa menunjukkan nilai *consistency ratio* (CR) sebesar -1,019, dimana syarat CR adalah $<0,1$.

Pada dasarnya, dari faktor peraturan pemerintah terdapat pajak lahan di Kecamatan Singosari yang tergolong tinggi bagi pemilik lahan. Pemerintah juga mudah untuk memberikan izin usaha untuk investor yang ingin mengembangkan bisnisnya di Kecamatan Singosari. Hal ini berpotensi untuk mempengaruhi pemilik lahan lainnya dalam mengalihfungsikan lahannya demi meraup keuntungan yang lebih besar. Pada dasarnya, pemerintah telah menyediakan subsidi yang besar untuk para pemilik lahan, namun proses untuk memperoleh subsidi tersebut sedikit rumit, yang mana harus memiliki kartu tani, sedangkan banyak pemilik lahan yang belum memilikinya. Di sisi lain, terdapat faktor lain yang menyebabkan alih fungsi lahan di Kecamatan Singosari, yakni pembangunan fasilitas publik berupa Tol Pandaan-Malang yang mengharuskan adanya pembebasan lahan di beberapa desa di Kecamatan Singosari, antara lain Desa Dengkol, Desa Wonosari, Desa Tirtomoyo, maupun Desa Banjararum, dan juga adanya suatu proyek pemerintah yang mengubah Kecamatan Singosari menjadi Kawasan Khusus Ekonomi (KEK). Hal ini dapat mendorong lebih banyak wisatawan yang keluar masuk kecamatan, peluang bisnis yang semakin besar, sektor non pertanian yang semakin maju, serta sektor pertanian yang semakin ditinggalkan.

Adanya tingkat aksesibilitas yang tinggi di Kecamatan Singosari, membuat masyarakat Kecamatan Singosari juga memiliki pemikiran bisnis yang lebih dominan. Hal ini didasari bahwa banyaknya peluang untuk membuka usaha di sektor non pertanian, yang menyebabkan upah mata pencaharian di sektor non

pertanian ikut dinilai lebih menjanjikan. Adapun penduduk usia muda di Kecamatan Singosari juga memilih untuk menjadi pegawai atau bekerja di sektor non pertanian. Hal ini yang mendasari sangat sedikitnya generasi muda yang mau terjun di sektor pertanian.

Tabel 4.9: **Perhitungan Prioritas Bobot Kriteria Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari**

	E	S	L	G	Jumlah	Prioritas Bobot
E	0,300	0,167	0,375	0,375	1,217	0,304
S	0,300	0,167	0,125	0,125	0,717	0,179
L	0,100	0,167	0,125	0,125	0,517	0,129
G	0,300	0,500	0,375	0,375	1,550	0,388

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh nilai prioritas bobot untuk masing-masing kriteria di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari. Hasil di atas menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari adalah faktor peraturan pemerintah, dengan nilai prioritas bobot 0,388. Selanjutnya diikuti oleh faktor ekonomi dengan nilai prioritas bobot 0,304, faktor sosial dengan nilai prioritas bobot 0,179 dan terakhir adalah faktor kondisi lahan dengan nilai prioritas bobot 0,129. Nilai dari keempat faktor tersebut adalah konsisten, karena hasil analisa menunjukkan nilai *consistency ratio* (CR) sebesar -1,019, dimana syarat CR adalah $<0,1$

Pada dasarnya, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang, dua kecamatan ini termasuk ke dalam wilayah pengembangan (WP) I yakni berada pada lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang. Pemerintah telah menentukan prioritas pengembangan infrastruktur untuk Kecamatan

Karangploso dan Kecamatan Singosari, antara lain peningkatan akses jalan tembus ke Kota Malang; pengembangan jalan Malang-Batu; peningkatan konservasi lingkungan; peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang - Bandara Abdul Rahman Saleh serta pengembangan pemukiman. Adapun Kecamatan Karangploso merupakan daerah segitiga emas yakni Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu yang membuat kecamatan ini diarahkan untuk menjadi kawasan pertumbuhan cepat atau disebut dengan Kawasan Perkotaan Karangploso (KPK) yang merupakan pendukung adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kecamatan Singosari. Pemerintah Kabupaten Malang juga mengharapkan hadirnya investor yang membangun sarana bisnis di dua kawasan ini. Hal ini dapat memicu pro dan kontra dalam permasalahan lahan yang akan digunakan untuk mendukung program tersebut, karena menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Lili Soleh W, diperkirakan KEK akan memerlukan tambahan lahan seluas 70 hektare dari total 300 hektare. Namun isu ini masih sedang dalam penantian sampai pada Ketetapan Presiden.

Tabel 4.10: Perbandingan Prioritas Bobot Kriteria Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari

Kriteria	Karangploso	Singosari	Prioritas Bobot
E	0,227	0,773	0,304
S	0,556	0,444	0,179
L	0,625	0,375	0,129
G	0,588	0,412	0,388
Jumlah	0,477	0,523	

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.10, diperoleh hasil perhitungan AHP yang menunjukkan bahwa Kecamatan Singosari memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Karangploso yakni 52,3% dibanding 47,7%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Malang untuk Kecamatan Singosari sebesar 52,3%, sedangkan untuk Kecamatan Karangploso sebesar 47,7%. Pada dasarnya hanya selisih 4,6%, artinya kedua kecamatan tersebut samasama memiliki peluang yang besar dalam alih fungsi lahan, serta nilai prioritas bobot tertinggi tetap pada faktor peraturan pemerintah. Hal ini relevan dengan adanya proyek pemerintah yang terus berkembang di dua kecamatan ini sebagai upaya pembangunan suatu daerah serta pengaruh perkembangan perkotaan yakni Kota Malang dan Kota Batu, karena lokasi Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari berhimpitan pada perkotaan tersebut.

4.2.2 Perbandingan Prioritas Bobot Pada Level 2 (*Sub-Criteria*)

Pada bagian ini, dapat diketahui hasil analisis atas perbandingan prioritas bobot antar sub-faktor di dalam suatu faktor, serta di masing-masing kecamatan. Misalnya, pada faktor ekonomi terdapat sub-faktor pendapatan tidak mencukupi, tanggungan keluarga tinggi, model pertanian tinggi, dan rendahnya insentif petani. Oleh karena itu, *output* yang dihasilkan menjadi lebih rinci mengenai penyebab utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari. Seperti halnya Tabel 4.11 berikut ini yang menjelaskan tentang perbandingan sub kriteria pada faktor ekonomi.

Tabel 4.11 : **Perbandingan Prioritas Bobot SubKriteria Berdasarkan Faktor Ekonomi**

SubKriteria	Karangploso	Singosari
E1	0,390	0,174
E2	0,122	0,067
E3	0,304	0,198
E4	0,185	0,561

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Keterangan :

- a. Pendapatan tidak mencukupi (E1)
- b. Tanggungan keluarga tinggi (E2)
- c. Model pertanian tinggi (E3)
- d. Rendahnya insentif petani (E4)

Data pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa ada perbedaan antara Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari dalam hal pemilihan sub kriteria faktor ekonomi, yang mana responden Kecamatan Karangploso memilih E1 dengan nilai bobot 0,390, sedangkan responden Kecamatan Singosari memilih E4 dengan nilai bobot 0,561. Artinya, faktor ekonomi yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Karangploso terletak pada alasan bahwa pendapatan yang diterima dari hasil pertanian tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan di Kecamatan Singosari disebabkan rendahnya insentif petani. Maksud dari insentif di sini adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Menurut hasil survei, pada dasarnya pemerintah sudah memberikan subsidi dan sudah jelas alur pendistribusiannya. Namun, yang menjadi kendala adalah persyaratan untuk memperoleh subsidi tersebut yaitu harus memiliki kartu tani, sedangkan banyak petani atau pemilik lahan di Kecamatan Singosari yang belum memiliki kartu tani.

Tabel 4.12 : **Perbandingan Prioritas Bobot SubKriteria Berdasarkan Faktor Sosial**

SubKriteria	Karangploso	Singosari
S1	0,532	0,509
S2	0,157	0,068
S3	0,225	0,217
S4	0,085	0,206

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Keterangan :

- a. Tradisi kegotongroyongan memudar (S1)
- b. Tidak ada generasi muda di sektor pertanian (S2)
- c. Gaya hidup lebih modern (S3)
- d. Hukum waris menyebabkan lahan tidak memenuhi skala ekonomi (S4)

Data pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa ada persamaan antara Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari dalam hal pemilihan sub kriteria faktor sosial, yang mana responden Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari memilih S1 dengan nilai bobot yang berbeda, yakni 0,532 untuk Kecamatan Karangploso dan 0,509 untuk Kecamatan Singosari. Artinya, faktor sosial yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari terletak pada alasan bahwa tradisi kegotongroyongan yang mulai memudar. Sudah tidak dapat dipungkiri hal tersebut bisa terjadi di era globalisasi yang mana masyarakat bersikap individualis dan materialistis. Menurut hasil survei, kurang adanya jiwa sosial antarpetani maupun pemilik lahan di dua kecamatan ini. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi membuat seseorang hanya mau membantu apabila diberi upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Namun Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sudah berupaya untuk menaungi para

GAPOKTAN maupun Kelompok Tani supaya lebih terstruktur dan mudah untuk memahami permasalahan yang terjadi di lapangan.

Tabel 4.13 : **Perbandingan Prioritas Bobot SubKriteria Berdasarkan Faktor Kondisi Lahan**

SubKriteria	Karangploso	Singosari
L1	0,440	0,440
L2	0,075	0,091
L3	0,081	0,089
L4	0,404	0,379

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Keterangan :

- Lokasi lahan memiliki aksesibilitas tinggi (L1)
- Luas lahan tidak memenuhi skala produksi (L2)
- Harga lahan dinilai tinggi (L3)
- Lahan kurang produktif (gersang/tidak subur) (L4)

Data pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa juga terdapat persamaan antara Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari dalam hal pemilihan sub kriteria faktor kondisi lahan, yang mana responden Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari memilih L1 dengan nilai prioritas bobot sebesar 0,440. Artinya, faktor kondisi lahan yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari terletak pada alasan bahwa lokasi lahan memiliki aksesibilitas tinggi. Hal ini relevan dengan lokasi dua kecamatan ini memang berdampingan dengan perkotaan yang padat, yakni Kota Malang yang dikenal dengan sebutan Kota Pendidikan, dan Kota Batu yang dikenal dengan sebutan Kota Wisata. Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari juga masuk ke

dalam Wilayah Pengembangan (WP I) yang telah direncanakan Pemerintah Kabupaten Malang dalam RPJMD 2016-2021.

Tabel 4.14: : **Perbandingan Prioritas Bobot SubKriteria Berdasarkan Faktor Peraturan Pemerintah**

SubKriteria	Karangploso	Singosari
G1	0,273	0,346
G2	0,279	0,080
G3	0,125	0,103
G4	0,141	0,294
G5	0,141	0,294

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Keterangan :

- a. Pajak lahan tinggi (G1)
- b. Kemudahan perizinan usaha (G2)
- c. Pengendalian (ekspansi) konversi lahan pertanian yang masih rendah (G3)
- d. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (G4)
- e. Kegiatan PRONA (Proyek Operasional Nasional Agraria) tidak berjalan efektif (G5)

Data pada Tabel 4.14 menunjukkan bahwa ada perbedaan antara Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari dalam hal pemilihan sub kriteria faktor peraturan pemerintah, yang mana responden Kecamatan Karangploso memilih G2 dengan nilai bobot 0,279, sedangkan responden Kecamatan Singosari memilih G1 dengan nilai bobot 0,346. Artinya, faktor peraturan pemerintah yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Karangploso terletak pada alasan bahwa pemerintah mudah dalam memberikan izin usaha. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya industri maupun perumahan berdiri di kecamatan ini.

Sedangkan penyebab di Kecamatan Singosari adalah pajak lahan yang tergolong tinggi dan memberatkan pemilik lahan, sehingga muncul pernyataan bahwa lahan yang di kerjakan tidak memenuhi skala produksi.

4.3 Implikasi terhadap Sosial Ekonomi Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari

Adanya beberapa faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian pada Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari ini juga berdampak pada suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain penduduk yang pada awalnya mayoritas seluruh kegiatannya tidak lepas dari sektor pertanian mengalami peningkatan kualitas hidup yang mana kegiatannya menjadi semakin bermanfaat dengan lapangan usaha yang kian luas. Kemudian, adanya area perdagangan (pertokoan) menyebabkan masyarakat yang awalnya tidak memiliki tempat yang tetap untuk melakukan kegiatan wirausaha, saat ini mereka memiliki *stand* sebagai tempat berjualan/berdagang sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kualitas produk mereka. Begitu pula pendapatan masyarakat yang pada awalnya hanya bergantung pada sektor pertanian, saat ini mereka dapat mengembangkan sektor perdagangan, jasa, dan lain-lain sebagai dampak dari lokasi dua kecamatan ini yang strategis serta dekat dengan wilayah pariwisata (Kota Batu) yang mana berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal tersebut tentu diikuti oleh kesempatan kerja yang juga bertambah di beberapa sektor, misalnya usaha cinderamata, hiburan, dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari yang telah dianalisis menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya penyebab utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Karangploso dari faktor ekonomi adalah pendapatan yang diterima dari hasil pertanian tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan dari faktor sosial adalah tradisi kegotongroyongan yang mulai memudar. Adapun dari penyebab utama dari faktor kondisi lahan adalah lokasi lahan yang memiliki tingkat aksesibilitas tinggi, serta dari faktor peraturan pemerintah adalah kemudahan pemerintah dalam memberikan izin usaha.
- b. Kemudian, penyebab utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Singosari dari faktor ekonomi adalah rendahnya insentif petani, sedangkan dari faktor sosial adalah tradisi kegotongroyongan yang mulai memudar. Adapun dari faktor kondisi lahan yakni lokasi lahan memiliki tingkat aksesibilitas tinggi. Hal ini sama dengan Kecamatan Karangploso, karena lokasi dua kecamatan ini sangat strategis. Sedangkan penyebab terakhir dari faktor peraturan pemerintah adalah pajak lahan di Kecamatan Singosari yang tergolong tinggi,

sehingga beberapa fenomena tersebut yang mempengaruhi pemilik lahan untuk mengalihfungsikan lahannya.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini, antara lain:

- a. Alih fungsi lahan tidak mungkin dapat dicegah karena yang memiliki kuasa untuk memperjualbelikan lahan adalah pemilik lahan itu sendiri. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemilik lahan untuk menjual lahannya, salah satunya adalah faktor ekonomi. Oleh karena itu, sebaiknya pemilik lahan lebih baik dalam mengolah dan memanfaatkan lahan, karena terkadang beda kondisi lahan beda pula cara penanganannya, sehingga bagi yang belum memiliki pengetahuan khusus mengenai hal tersebut menganggap lahannya tidak produktif yang mana berdampak pada pendapatan dari hasil pertanian tidak mencukupi.
- b. Adapula saran untuk mengatasi alih fungsi lahan dari faktor sosial, yakni menanamkan kesadaran pada diri sendiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita hidup di negara yang memiliki tradisi kegotongroyongan tinggi, jadi harus saling membantu apabila dibutuhkan, karena misalnya apabila suatu lahan sawah mengalami masalah, maka akan berdampak pula pada lahan-lahan di sekitarnya yang justru semakin merugikan banyak sawah. Kemudian, sangat penting untuk menanamkan pada generasi penerus sejak dini bahwa sektor pertanian adalah sumber utama dari segala sektor yang ada di dunia, jadi kita harus menjaganya dengan baik apalagi di era globalisasi yang mendorong masyarakat untuk bergaya lebih modern.

- c. Apabila dilihat dari faktor kondisi lahan yang mana lokasi lahan di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi, maka hendaknya pemilik lahan memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya mempertahankan lahan pertanian di wilayah pinggiran kota untuk menghindari kerawanan pangan, kerusakan lingkungan, maupun ancaman mudarnya budaya-budaya lokal, karena untuk membuat lahan sawah baru membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama. Seharusnya, wilayah pinggiran yang rawan untuk pengembangan perkotaan seperti Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari yang berada pada wilayah pengembangan yang berorientasi pada lingkaran Kota Malang wajib dibentengi payung hukum di setiap daerahnya agar tidak mengabaikan tata kelola ruangnya.
- d. Apabila dilihat dari faktor peraturan pemerintah, hendaknya Pemerintah Kabupaten Malang memperketat pengendalian alih fungsi lahan pertanian juga memperjelas kebijakan karena selama ini kebijakan pemerintah masih bersifat ambigu. Di satu sisi, RTRW Kabupaten Malang dengan tegas melarang alih fungsi lahan pertanian dan di sisi lain RTRW Kabupaten Malang juga menghendaki tumbuhnya pembangunan di sektor non pertanian demi perekonomian yang lebih maju.
- e. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah mengamati sektor basis di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari sebagai upaya untuk mengintegrasikan sektor-sektor yang berkembang di wilayah tersebut, karena semakin kuat integrasi di antara sektor-sektor unggulan dalam suatu wilayah, maka semakin tinggi pula kesiapan suatu wilayah dalam menghadapi pembangunan, sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan pemerintah dalam pembuatan kebijakan, perumusan strategi, maupun perencanaan proyek seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Kecamatan Singosari,

agar tepat sasaran tanpa ada satu sektor unggul yang dikorbankan, misalnya sektor pertanian. Kemudian, mengamati adanya implikasi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari setelah adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, Muhammad. 2017. Kecamatan Singosari Dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3597693/kecamatan-singosari-dijadikan-kawasan-ekonomi-khusus-pariwisata>) diakses pada tanggal 28 Januari 2018.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2013. *Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap)*. Surabaya: Badan Pusat Statistik.
- Billy, Apfia Tioconny. 2017. Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang Sudah Mencapai 78 Persen. (<http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/14/pembebasan-lahan-pembangunan-jalan-tol-pandaan-malang-sudah-mencapai-78-persen>) diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.
- Brojonegoro, B. 1992. *AHP (the Analytical Hierarchy Process)*. Jakarta: Pusat Antar University – Studi Ekonomi Universitas Indonesia.
- Dewi, Ida Ayu Listia dan I Made Sarjana. 2015. Faktor-Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian (Kasus: Subak Kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan). *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2015, ISSN: 2355-0759. (<https://media.neliti.com/media/publications/26303-ID-faktor-faktor-pendorong-alihfungsi-lahan-sawah-menjadi-lahan-non-pertanian-kasus.pdf>) diakses pada tanggal 10 Mei 2017.
- Duangjai, Wirongrong, dkk. 2015. Farmer's Land Use Decision-Making in the Context of Changing Land and Conservation Policies: A Case Study of Doi Mae Salong in Chiang Rai Province, Northern Thailand. *Land Use Policy*, 48 (2015) 179-189. (<http://www.elsevier.com/locate/landusepol>) diakses pada tanggal 30 Mei 2017.
- Hanan, Abdul. 2016. Bupati Malang: Perketat Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian. (<http://www.malangtimes.com/baca/14570/20160927/115152/bupati-malang-perketat-izin-alih-fungsi-lahan-pertanian/>) diakses pada tanggal 27 September 2017.
- Ismail, Muhammad Kharis Ja'far, dkk. 2017. Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Pariwisata Kota Batu Bagi Kawasan Sekitar (Studi Pada Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 51 No. 1 Oktober 2017. (<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/>) diakses pada tanggal 28 Januari 2018.
- Nguyen, Thi Ha Thanh, dkk. 2016. Socio-Economic Effects of Agricultural Land Conversion for Urban Development: Case Study of Hanoi, Vietnam. *Land Use Policy*, 54 (2016) 583-592. (<http://www.elsevier.com/locate/landusepol>) diakses pada tanggal 30 Mei 2017.
- Pemerintah Kabupaten Malang. 2016. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. (<http://www.malangkab.go.id/>) diakses pada tanggal 27 Januari 2018.
- Pemerintah Kabupaten Malang. 2017. *Programa Kecamatan Karangploso*. Kabupaten Malang: Kantor Kecamatan Karangploso.

- Pemerintah Kabupaten Malang. 2017. *Programa Kecamatan Singosari*. Kabupaten Malang: Kantor Kecamatan Singosari.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Prajanti, Sucihatiningih Dian Wisika. 2014. Strategy for Controlling Agricultural Land Conversion Of Paddy By Using Analytical Hierarchy Process In Central Java. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, Vol. 25 Issue: 5, pp.631-64 (<http://www.emeraldinsight.com/1477-7835.htm>) diakses pada tanggal 30 Mei 2017.
- Rahman, Moh Ainur. 2016. Hasil Riset UB: Karangploso, Contoh Urban Sprawl. (<http://www.malangtimes.com/baca/14578/20160927/164557/hasil-riset-ub-karangploso-contoh-urban-sprawl/>) diakses pada tanggal 28 Januari 2018.
- Rusmalina. 2017. Strategi Pengembangan Bank Sampah di Kabupaten Probolinggo. *Tesis Magister Ilmu Ekonomi*. Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Saaty, T. L. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2013. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Widodo, Sri dan Pinjung Nawangsari. 2016. *Dinamika Pembangunan Pertanian*. Yogyakarta: Liberty.
- Widya, Mohammad Emil dan Adjie Pamungkas. 2013. Pengendalian Konversi Lahan Pertanian Pangan Menjadi Non Pertanian Berdasarkan Preferensi Petani di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Teknik POMITS*. Vol. 2, No. 2, (2013) ISSN: 2337-3539. (<http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/viewFile/3923/1234>) diakses pada tanggal 17 Juni 2017.

Lampiran 1 : Daftar Nama Responden Penelitian

No	Nama Responden	Kecamatan	Pekerjaan/Jabatan	Aspek/faktor yang dikuasai
1	Moh. Zamil	Singosari	Koordinator PPL	Peraturan Pemerintah
2	Erdi Prang Basuki R.	Singosari	PPL	Peraturan Pemerintah
3	Rizaludin Idi Amin	Singosari	PPL	Peraturan Pemerintah
4	Sugito	Singosari	PPL	Peraturan Pemerintah
5	Septiana Dwi Hapsari	Singosari	PPL	Peraturan Pemerintah
6	Sri Ismiyati	Singosari	PPL	Peraturan Pemerintah
7	Purwanto	Singosari	Pengamat Pertanian	Kondisi Lahan
8	Sholikhan	Singosari	Bendahara GAPOKTAN	Ekonomi dan Sosial
9	Achmad Badri Rofi'i	Singosari	Ketua GAPOKTAN	Ekonomi dan Sosial
10	Fahrur Rozzy	Singosari	Ketua GAPOKTAN	Ekonomi dan Sosial
11	Chriesna Cutha Radtra	Karangploso	Koordinator PPL	Peraturan Pemerintah
12	Hariyanto	Karangploso	PPL	Peraturan Pemerintah
13	Catur Sri Wijayanti	Karangploso	PPL	Peraturan Pemerintah
14	Edi Hermanto	Karangploso	Pengamat Pertanian	Kondisi Lahan
15	Rohim	Karangploso	Ketua GAPOKTAN	Ekonomi dan Sosial
16	Sukriyadi	Karangploso	Ketua GAPOKTAN	Ekonomi dan Sosial
17	Rudi	Karangploso	Bendahara GAPOKTAN	Ekonomi dan Sosial
18	Bambang Wirawan	Karangploso	Ketua Kelompok Tani	Ekonomi dan Sosial
19	Muh. Nur Yasir	Karangploso	Ketua Kelompok Tani	Ekonomi dan Sosial
20	Ahmad Junaidi	Karangploso	Ketua Kelompok Tani	Ekonomi dan Sosial

Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PREFERENSI PEMILIK LAHAN DALAM MELAKUKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN

(Studi pada Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)

Nama saya Tinovia Harlies Reynalda, mahasiswa S1 jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan konsentrasi Sumber Daya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Saat ini, saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) sebagai salah satu syarat untuk meraih derajat Sarjana Ekonomi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong preferensi pemilik lahan dalam melakukan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta mengetahui penyebab utama yang mendorong pemilik lahan untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari. Adapun metode analisis data yang akan saya gunakan adalah teknik AHP (*Analytical Hierarchy Process*) yang mana dalam penilaian AHP secara akurat memerlukan pakar sebagai responden dalam pengambilan keputusan dan pemilihan alternatif. Para pakar yang dimaksud adalah orang-orang yang kompeten yang menguasai, serta berpengaruh dalam pengambilan keputusan maupun mengetahui segala informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu melengkapi kuisisioner ini sehingga dapat memudahkan saya untuk memperoleh data.

Harapan saya, penelitian ini ke depannya dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, civitas akademika, pemilik lahan, maupun pemerintah sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan reformasi agraria. Atas perhatian dan kesediaan untuk bekerjasama dari Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Tinovia Harlies Reynalda

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berilah penilaian atas pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan melingkari salah satu pilihan angka di bawah ini:

- Angka 1 = kedua elemen **sama dominannya**
- Angka 3 = elemen yang satu **sedikit lebih dominan** daripada elemen lainnya
- Angka 5 = elemen yang satu **sangat dominan** daripada elemen lainnya
- Angka 7 = satu elemen **jelas lebih dominan** daripada elemen lainnya
- Angka 9 = satu elemen **mutlak lebih dominan** daripada elemen lainnya
- Nilai 2, 4, 6, 8 adalah nilai antara dari dua pertimbangan yang berdekatan

Setiap responden memilih jawaban dengan membandingkan tingkat prioritas kepentingan (antara 1 sampai dengan 9) dari kedua elemen faktor dengan melingkari salah satu kolom bobot nilai tersebut, seperti contoh berikut ini :

Contoh :

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Artinya: pilihan A “sedikit lebih dominan” dibandingkan dengan pilihan B

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Artinya: Pilihan B “jelas lebih dominan” dibandingkan dengan pilihan A

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Artinya: Pilihan A “sama dominan” dengan pilihan B

DATA RESPONDEN

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Status Perkawinan :

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENDAHULUAN

Di bawah ini terdapat kriteria dan subkriteria dalam pemilihan faktor utama pendorong alih fungsi lahan di Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari. Apabila terdapat kriteria yang juga perlu dipertimbangkan, maka Bapak/Ibu dapat menambahkan di bawah ini.

1. Faktor Ekonomi (E)

- a. Pendapatan tidak mencukupi (E1)
- b. Tanggungan keluarga tinggi (E2)
- c. Model pertanian tinggi (E3)
- d. Rendahnya insentif petani (E4)
- e.
- f.
- g.

2. Faktor Sosial (S)

- a. Tradisi kegotongroyongan memudar (S1)
- b. Tidak ada generasi muda di sektor pertanian (S2)
- c. Gaya hidup lebih modern (S3)

- d. Hukum waris menyebabkan lahan tidak memenuhi skala ekonomi (S4)
- e.
- f.

3. Faktor Kondisi Lahan (L)

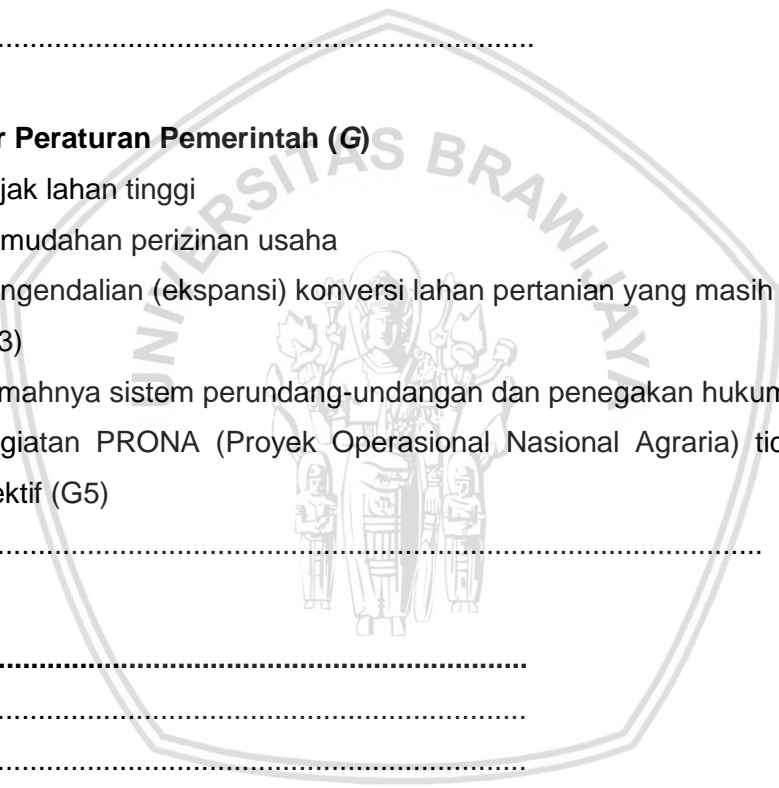
- a. Lokasi lahan memiliki aksesibilitas tinggi (L1)
- b. Luas lahan tidak memenuhi skala produksi (L2)
- c. Harga lahan dinilai tinggi (L3)
- d. Lahan kurang produktif (gersang/tidak subur)(L4)
- e.
- f.

4. Faktor Peraturan Pemerintah (G)

- a. Pajak lahan tinggi (G1)
- b. Kemudahan perizinan usaha (G2)
- c. Pengendalian (ekspansi) konversi lahan pertanian yang masih rendah (G3)
- d. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (G4)
- e. Kegiatan PRONA (Proyek Operasional Nasional Agraria) tidak berjalan efektif (G5)
- f.

5.

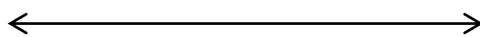
- a.
- b.



**KUESIONER PENETAPAN BOBOT/PRIORITAS DARI KRITERIA-
KRITERIA DALAM PEMILIHAN FAKTOR UTAMA YANG MENDORONG
PEMILIK LAHAN MELAKUKAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KECAMATAN
KARANGPLOSO DAN KECAMATAN SINGOSARI, KABUPATEN
MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR**

Kriteria	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kriteria
Faktor Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor Sosial
Faktor Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor Kondisi Lahan
Faktor Ekonomi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor Peraturan Pemerintah
Faktor Sosial	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor Kondisi Lahan
Faktor Sosial	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor Peraturan Pemerintah
Faktor Kondisi Lahan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Faktor Peraturan Pemerintah

Sisi kiri lebih dominan



Sisi kanan lebih dominan

**KUESIONER PENETAPAN BOBOT/PRIORITAS DARI SUBKRITERIA
DALAM PEMILIHAN FAKTOR UTAMA YANG MENDORONG PEMILIK
LAHAN MELAKUKAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KECAMATAN
KARANGPLOSO DAN KECAMATAN SINGOSARI, KABUPATEN
MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR**

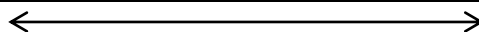
1. Faktor Ekonomi (E)

Pada kriteria ini terdapat 4 subkriteria, antara lain :

- a. Pendapatan tidak mencukupi (E1)
- b. Tanggungan keluarga tinggi (E2)
- c. Model pertanian tinggi (E3)
- d. Rendahnya insentif petani (E4)

Subkriteria	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Subkriteria
E1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	E2
E1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	E3
E1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	E4
E2	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	E3
E2	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	E4
E3	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	E4

Sisi kiri lebih dominan



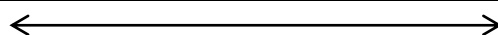
Sisi kanan lebih dominan

2. Faktor Sosial (S)

- a. Tradisi kegotongroyongan memudar (S1)
- b. Tidak ada generasi muda di sektor pertanian (S2)
- c. Gaya hidup lebih modern (S3)
- d. Hukum waris menyebabkan lahan tidak memenuhi skala ekonomi (S4)

Subkriteria	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Subkriteria
S1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	S2
S1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	S3
S1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	S4
S2	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	S3
S2	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	S4
S3	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	S4

Sisi kiri lebih dominan



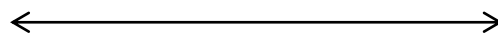
Sisi kanan lebih dominan

3. Faktor Kondisi Lahan (L)

- Lokasi lahan memiliki aksesibilitas tinggi (L1)
- Luas lahan tidak memenuhi skala produksi (L2)
- Harga lahan dinilai tinggi (L3)
- Lahan kurang produktif (gersang/tidak subur)(L4)

Subkriteria	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Subkriteria
L1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	L2
L1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	L3
L1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	L4
L2	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	L3
L2	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	L4
L3	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	L4

Sisi kiri lebih dominan



Sisi kanan lebih dominan

4. Faktor Peraturan Pemerintah (G)

- Pajak lahan tinggi (G1)
- Kemudahan perizinan usaha (G2)
- Pengendalian (ekspansi) konversi lahan pertanian yang masih rendah (G3)

- d. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (G4)
- e. Kegiatan PRONA (Proyek Operasional Nasional Agraria) tidak berjalan efektif (G5)

Subkriteria	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Subkriteria
G1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	G2
G1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	G3
G1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	G4
G1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	G5
G2	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	G3
G2	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	G4
G2	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	G5
G3	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	G4
G3	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	G5
G4	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	G5

Sisi kiri lebih dominan ← → Sisi kanan lebih dominan

Lampiran 3 : Rekapitulasi Hasil Penilaian Responden

1. Kecamatan Karangploso

FAKTOR	RESPONDEN										FAKTOR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E	6	1	-3	-3	5	-5	4	-5	1	1	S
E	4	-3	3	-5	1	7	3	-4	-3	-3	L
E	5	-5	1	1	1	-5	-5	-4	-3	-3	G
S	8	3	1	1	-5	7	5	5	-3	-3	L
S	3	-5	-3	-3	-5	-3	-4	1	-3	-3	G
L	6	-5	-3	-3	-3	-7	1	-4	1	-3	G

SUBKRITERIA	RESPONDEN										SUBKRITERIA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E1	-3	3	3	-3	-5	-5	1	1	2	3	E2
E1	5	3	-3	-3	-3	-5	-6	5	3	3	E3
E1	5	1	1	1	1	1	4	2	-2	-2	E4
E2	1	-3	-3	-3	5	-3	1	-5	-2	2	E3
E2	1	-3	1	1	5	1	3	1	-2	-3	E4
E3	1	-3	3	3	-3	1	3	3	-3	-2	E4
S1	7	1	7	1	7	5	-3	1	2	5	S2
S2	7	1	3	3	3	1	4	3	3	2	S3
S3	3	5	3	3	-5	1	6	1	-2	1	S4
S2	-3	1	1	3	-7	-7	-3	1	-2	-5	S3
S2	3	3	3	1	-5	-7	-3	1	3	-5	S4
S3	5	5	3	1	-5	1	4	-2	5	-2	S4
L1	5	1	-7	-5	3	-7	-3	-2	-7	-7	L2
L1	7	1	1	1	5	3	-3	5	1	-5	L3
L1	5	-5	-7	-5	3	7	-5	-2	-7	-7	L4
L2	1	-3	3	5	5	5	4	5	7	7	L3
L2	3	-3	-3	1	-5	7	4	1	1	1	L4
L3	-5	-5	7	-5	-5	1	1	-5	-7	-7	L4
G1	1	3	3	1	-3	5	-3	-2	1	3	G2
G1	1	3	3	1	-3	7	1	2	-3	3	G3
G1	2	5	5	1	3	1	5	3	1	5	G4
G1	2	3	7	1	1	1	5	5	3	-2	G5
G2	6	1	3	3	-5	-5	-2	1	3	3	G3
G2	3	1	1	1	-3	-3	-3	1	1	-3	G4
G2	2	1	3	3	1	-3	3	5	3	-3	G5
G3	4	1	-3	-3	3	-3	1	-2	1	-3	G4
G3	4	1	-3	1	3	-5	-2	5	1	-3	G5
G4	-2	1	-3	3	-3	-3	1	1	-3	1	G5

2. Kecamatan Singosari

FAKTOR	RESPONDEN										FAKTOR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E	3	-4	-7	3	-6	-3	-3	3	3	1	S
E	3	5	3	-4	4	3	-3	3	6	-5	L
E	1	6	-7	1	-4	5	4	3	1	-3	G
S	1	1	5	3	1	-4	1	1	4	-6	L
S	-5	1	-7	5	-3	-3	-2	-3	3	-5	G
L	-5	1	-7	-3	-3	5	3	3	-4	-3	G

SUBKRITERIA	RESPONDEN										SUBKRITERIA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E1	1	4	5	4	6	3	6	-4	-3	3	E2
E1	1	2	3	-3	1	1	4	1	-6	-4	E3
E1	-5	6	-7	-6	-4	1	-4	-3	-3	-6	E4
E2	-5	-4	-5	-4	-4	-5	1	3	-4	4	E3
E2	-5	-4	-7	-4	-3	-5	-5	-3	-6	-6	E4
E3	-3	-3	-7	-3	1	1	-5	-4	3	-6	E4
S1	3	-3	1	4	4	4	1	3	6	6	S2
S2	5	3	-7	2	3	6	-3	3	6	5	S3
S3	3	1	5	3	4	4	1	2	-3	4	S4
S2	-5	3	-7	-4	-4	4	-5	2	-3	-6	S3
S2	-5	2	-7	-3	1	6	-5	-3	-6	1	S4
S3	5	1	3	4	3	4	1	1	-6	1	S4
L1	-5	1	-7	-6	-4	-4	-3	6	-6	-7	L2
L1	1	4	1	-2	1	6	5	-6	6	6	L3
L1	-5	-3	3	-4	-3	-3	-3	6	-6	-6	L4
L2	5	4	5	2	4	3	3	3	6	4	L3
L2	1	1	7	1	1	-3	-2	-3	-3	1	L4
L3	-5	-4	5	-3	-4	-5	-5	1	-6	-4	L4
G1	1	3	-3	2	3	4	-5	1	3	4	G2
G1	5	4	-4	-3	-4	4	-2	4	3	3	G3
G1	3	3	7	-4	-4	4	1	4	3	6	G4
G1	1	1	-5	-3	-4	-3	-3	4	4	1	G5
G2	-3	1	-7	-2	1	1	-2	-3	3	-4	G3
G2	-3	3	-5	-3	-3	1	-3	1	3	4	G4
G2	-5	-5	-7	-4	-3	-5	-4	2	-3	1	G5
G3	1	-3	-6	1	1	1	1	-3	-3	1	G4
G3	-3	1	-5	-2	-3	-5	1	-3	-3	1	G5
G4	-3	1	-7	3	3	-4	1	1	-3	1	G5

Lampiran 4 : Langkah-Langkah Perhitungan AHP

1. Kecamatan Karangploso

Matriks Perbandingan Berpasangan

	E	S	L	G
E	1	1,000	0,333	0,200
S	1,000	1	1,000	0,333
L	3,000	1,000	1	0,333
G	5,000	3,000	3,000	1
Jumlah	10	6	5	2

Matriks Penilaian Kriteria

	E	S	L	G	Jumlah	Prioritas Bobot
E	0,100	0,167	0,063	0,107	0,436	0,109
S	0,100	0,167	0,188	0,179	0,633	0,158
L	0,300	0,167	0,188	0,179	0,833	0,208
G	0,500	0,500	0,563	0,536	2,098	0,525

2. Kecamatan Singosari

Matriks Perbandingan Berpasangan

	E	S	L	G
E	1	3,000	3,000	1,000
S	0,333	1	1,000	0,333
L	0,333	1,000	1	0,333
G	1,000	3,000	3,000	1
Jumlah	3	8	8	3

Matriks Penilaian Kriteria

	E	S	L	G	Jumlah	Prioritas Bobot
E	0,375	0,375	0,375	0,375	1,500	0,375
S	0,125	0,125	0,125	0,125	0,500	0,125
L	0,125	0,125	0,125	0,125	0,500	0,125
G	0,375	0,375	0,375	0,375	1,500	0,375

3. Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari

Matriks Perbandingan Berpasangan

	E	S	L	G
E	1	1,000	3,000	1,000
S	1,000	1	1,000	0,333
L	0,333	1,000	1	0,333
G	1,000	3,000	3,000	1
Jumlah	3	6	8	3

Matriks Penilaian Kriteria

	E	S	L	G	Jumlah	Prioritas Bobot
E	0,300	0,167	0,375	0,375	1,217	0,304
S	0,300	0,167	0,125	0,125	0,717	0,179
L	0,100	0,167	0,125	0,125	0,517	0,129
G	0,300	0,500	0,375	0,375	1,550	0,388

Matriks Perbandingan Berpasangan Pada Faktor Ekonomi

	K	S
K	1	0,294
S	3,4	1
Jumlah	4,4	1,294

Matriks Penilaian Kriteria Pada Faktor Ekonomi

	K	S	Jumlah	Prioritas
K	0,227	0,227	0,455	0,227
S	0,773	0,773	1,545	0,773

Matriks Perbandingan Berpasangan Pada Faktor Sosial

	K	S
K	1	1,250
S	0,8	1
Jumlah	1,8	2,250

Matriks Penilaian Kriteria Pada Faktor Sosial

	K	S	Jumlah	Prioritas
K	0,556	0,556	1,111	0,556
S	0,444	0,444	0,889	0,444

Matriks Perbandingan Berpasangan Pada Faktor Kondisi Lahan

	K	S
K	1	1,667
S	0,6	1
Jumlah	1,6	2,667

Matriks Penilaian Kriteria Pada Faktor Kondisi Lahan

	K	S	Jumlah	Prioritas
K	0,625	0,625	1,250	0,625
S	0,375	0,375	0,750	0,375

Matriks Perbandingan Berpasangan Pada Faktor Peraturan Pemerintah

	K	S
K	1	1,429
S	0,7	1
Jumlah	1,7	2,429

Matriks Penilaian Kriteria Pada Faktor Peraturan Pemerintah

	K	S	Jumlah	Prioritas
K	0,588	0,588	1,176	0,588
S	0,412	0,412	0,824	0,412

Rekapitulasi Perhitungan AHP

Kriteria	Karangploso	Singosari	Prioritas
E	0,227	0,773	0,304
S	0,556	0,444	0,179
L	0,625	0,375	0,129
G	0,588	0,412	0,388
Jumlah	0,477	0,523	

1. Subfaktor Ekonomi

Matriks Perbandingan Berpasangan di Kecamatan Karangploso

	E1	E2	E3	E4
E1	1	3,000	3,000	1,000
E2	0,333	1	0,333	1,000
E3	0,333	3,000	1	3,000
E4	1,000	1,000	0,333	1
Jumlah	3	8	5	6

Matriks Penilaian Kriteria di Kecamatan Karangploso

	E1	E2	E3	E4	jumlah	PRIORITAS BOBOT
E1	0,375	0,375	0,643	0,167	1,560	0,390
E2	0,125	0,125	0,071	0,167	0,488	0,122
E3	0,125	0,375	0,214	0,500	1,214	0,304
E4	0,375	0,125	0,071	0,167	0,738	0,185

Matriks Perbandingan Berpasangan di Kecamatan Singosari

	E1	E2	E3	E4
E1	1	4,000	1,000	0,167
E2	0,250	1	0,250	0,200
E3	1,000	4,000	1	0,333
E4	6,000	5,000	3,000	1
Jumlah	8	14	5	2

Matriks Penilaian Kriteria di Kecamatan Singosari

	E1	E2	E3	E4	jumlah	PRIORITAS BOBOT
E1	0,121	0,286	0,190	0,098	0,695	0,174
E2	0,030	0,071	0,048	0,118	0,267	0,067
E3	0,121	0,286	0,190	0,196	0,793	0,198
E4	0,727	0,357	0,571	0,588	2,244	0,561

2. Subfaktor Sosial

Matriks Perbandingan Berpasangan di Kecamatan Karangploso

	S1	S2	S3	S4
S1	1	7,000	3,000	3,000
S2	0,143	1	1,000	3,000
S3	0,333	1,000	1	5,000
S4	0,333	0,333	0,200	1
Jumlah	2	9	5	12

Matriks Penilaian Kriteria di Kecamatan Karangploso

	S1	S2	S3	S4	jumlah	PRIORITAS BOBOT
S1	0,553	0,750	0,577	0,250	2,130	0,532
S2	0,079	0,107	0,192	0,250	0,628	0,157
S3	0,184	0,107	0,192	0,417	0,900	0,225
S4	0,184	0,036	0,038	0,083	0,342	0,085

Matriks Perbandingan Berpasangan di Kecamatan Singosari

	S1	S2	S3	S4
S1	1	4,000	3,000	4,000
S2	0,250	1	0,200	0,200
S3	0,333	5,000	1	1,000
S4	0,250	5,000	1,000	1
Jumlah	2	15	5	6

Matriks Penilaian Kriteria di Kecamatan Singosari

	S1	S2	S3	S4	jumlah	PRIORITAS BOBOT
S1	0,545	0,267	0,577	0,645	2,034	0,509
S2	0,136	0,067	0,038	0,032	0,274	0,068
S3	0,182	0,333	0,192	0,161	0,869	0,217
S4	0,136	0,333	0,192	0,161	0,823	0,206

3. Subfaktor Kondisi Lahan

Matriks Perbandingan Berpasangan di Kecamatan Karangploso

	L1	L2	L3	L4
L1	1	0,143	1,000	0,200
L2	7,000	1	5,000	1,000
L3	1,000	0,200	1	0,200
L4	5,000	1,000	5,000	1
jumlah	14	2	12	2

Matriks Penilaian Kriteria di Kecamatan Karangploso

	L1	L2	L3	L4	jumlah	PRIORITAS BOBOT
L1	0,071	0,061	0,083	0,083	0,299	0,440
L2	0,500	0,427	0,417	0,417	1,760	0,075
L3	0,071	0,085	0,083	0,083	0,323	0,081
L4	0,357	0,427	0,417	0,417	1,617	0,404

Matriks Perbandingan Berpasangan di Kecamatan Singosari

	L1	L2	L3	L4
L1	1	0,143	1,000	0,333
L2	7,000	1	4,000	1,000
L3	1,000	0,250	1	0,200
L4	3,000	1,000	5,000	1
jumlah	12	2	11	3

Matriks Penilaian Kriteria di Kecamatan Singosari

	L1	L2	L3	L4	jumlah	PRIORITAS BOBOT
L1	0,083	0,060	0,091	0,132	0,366	0,440
L2	0,583	0,418	0,364	0,395	1,760	0,091
L3	0,083	0,104	0,091	0,079	0,358	0,089
L4	0,250	0,418	0,455	0,395	1,517	0,379

4. Subfaktor Peraturan Pemerintah

Matriks Perbandingan Berpasangan di Kecamatan Karangploso

	G1	G2	G3	G4	G5
G1	1	1,000	1,000	5,000	1
G2	1,000	1	3,000	1,000	3
G3	1,000	0,333	1	0,333	1
G4	0,200	1,000	3	1	1
G5	1,000	0,333	1,000	1	1
jumlah	4,2	3,7	9,0	8,3	7,0

Matriks Penilaian Kriteria di Kecamatan Karangploso

	G1	G2	G3	G4	G5	jumlah	PRIORITAS BOBOT
G1	0,238	0,273	0,111	0,600	0,143	1,365	0,273
G2	0,238	0,273	0,333	0,120	0,429	1,393	0,279
G3	0,238	0,091	0,111	0,040	0,143	0,623	0,125
G4	0,238	0,091	0,111	0,120	0,143	0,703	0,141
G5	0,238	0,091	0,111	0,120	0,143	0,703	0,141

Matriks Perbandingan Berpasangan di Kecamatan Singosari

	G1	G2	G3	G4	G5
G1	1	3,000	4,000	3,000	1
G2	0,333	1	1,000	0,333	0,2
G3	0,250	1,000	1	1,000	0,333333
G4	0,333	3,000	1	1	1
G5	1,000	5,000	3,000	1	1
jumlah	2,9	13,0	10,0	6,3	3,5

Matriks Penilaian Kriteria di Kecamatan Singosari

	G1	G2	G3	G4	G5	jumlah	PRIORITAS BOBOT
G1	0,343	0,231	0,400	0,474	0,283	1,730	0,346
G2	0,114	0,077	0,100	0,053	0,057	0,400	0,080
G3	0,086	0,077	0,100	0,158	0,094	0,515	0,103
G4	0,343	0,385	0,300	0,158	0,283	1,468	0,294
G5	0,343	0,385	0,300	0,158	0,283	1,468	0,294

Lampiran 5 : Foto Kegiatan

1. Wawancara dengan Koordinator PPL



2. Mencari beberapa informasi terkait topik penelitian kepada Gapoktan



3. Wawancara dengan Pengamat Pertanian



4. Pembebasan Lahan Pembangunan Tol Pandaan-Malang



Sumber : Google, 2018

5. Potret Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Karangploso



6. Potret Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Singosari

